

**PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP TINGKAT
OPTIMALISASI ASET TETAP PEMERINTAH
KOTA PAREPARE**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Manajemen



Oleh :

**R A M L A H
2017.MM.2.0985**

**PROGRAM PASCASARJANA
STIE NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2020**

**PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP TINGKAT
OPTIMALISASI ASET TETAP PEMERINTAH
KOTA PAREPARE**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Manajemen



Oleh :

**R A M L A H
2017.MM.2.0985**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH**

**PROGRAM PASCASARJANA
STIE NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN TESIS

**PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP TINGKAT
OPTIMALISASI ASET TETAP PEMERINTAH
KOTA PAREPARE**

Oleh :

**RAMLAH
2017.MM.2.0985**

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 15 Februari 2020
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Ketua,

Anggota

Prof. Dr. H. Saban Echdar, S.E, M.Si

Dr. Deddy Rahwandi Rahim, S.Ip. M.M

Mengetahui :

Direktur PPS STIE Nobel Indonesia

Ketua Prodi Magisters Manajemen

Dr. Maryadi, S.E., MM

Dr. Muhammad Idris, S.E., M.Si

HALAMAN IDENTITAS
MAHASISWA, PEMBIMBING DAN PENGUJI

JUDUL TESIS :

***PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP TINGKAT OPTIMALISASI
ASET TETAP PEMERINTAH KOTA PAREPARE.***

Nama Mahasiswa : RAMLAH
NIM : 2017.MM.2.0985
Program Studi : Magister Manajemen
Peminatan : Manajemen Keuangan Daerah

KOMISI PEMBIMBING

Ketua : Prof. Dr.H.Saban Echdar, S.E., M.Si.
Anggota : Dr. Deddy Rahwandi Rahim, S.Ip.,M.M.

TIM DOSEN PENGUJI:

Dosen Penguji 1 : Dr. Heri Sugeng Waluyo, S.E., M.M.
Dosen Penguji 2 : Dr. Maryadi, S.E., M.M

Tanggal Ujian : 15 Februari 2020
SK Penguji Nomor : 248/SK/PPS/STIE-NI/IX/2019

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelas akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka

Apabila ternyata didalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER MANAJEMEN) ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan Perudnang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 25 ayat 2 pasal 70)

Makassar, Februari 2020

Moh. Iqbal Ybs,

KAMLAH
Nim: 2017.MM.2.0985

ABSTRAK

Ramlah. 2020. Pengaruh Manajemen Aset terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Parepare, dibimbing oleh Saban Echdar dan Deddy Rahwandi Rahim.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaruh antara inventarisasi aset terhadap tingkat optimalisasi aset tetap milik pemerintah kota parepare (2) pengaruh antara legal audit terhadap tingkat optimalisasi aset tetap milik pemerintah Kota Parepare (3) pengaruh antara penilaian terhadap tingkat optimalisasi aset tetap milik pemerintah Kota Parepare (4) pengaruh antara pengawasan dan pengendalian terhadap tingkat optimalisasi aset tetap milik pemerintah Kota Parepare.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) ada pengaruh yang positif dan signifikan antara inventarisasi aset terhadap tingkat optimalitas aset tetap (tanah dan bangunan) milik pemerintah Kota Parepare (2) pengaruh yang negatif dan tidak signifikan antara legal audit terhadap tingkat optimalitas aset tetap (tanah dan bangunan) milik pemerintah Kota Parepare (3) ada pengaruh yang positif dan signifikan antara penilaian terhadap tingkat optimalitas aset tetap (tanah dan bangunan) milik pemerintah kota Parepare (4) ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pengawasan dan pengendalian terhadap tingkat optimalitas aset tetap (tanah dan bangunan) milik pemerintah Kota Parepare. Hal ini menunjukkan bahwa indikator inventarisasi aset, penilaian dan pengawasan serta pengendalian secara langsung mempengaruhi optimalisasi Aset Pemerintah Kota Parepare sedangkan indikator legal audit tidak mempengaruhi.

Kata Kunci: Manajemen Aset dan Optimalisasi Aset



ABSTRACT

Ramlah. 2020. *The Effect of Asset Management on the Optimization Level of Fixed Assets of the City Government of Parepare, supervised by Saban Echdar and Deddy Rahwandi Rahim.*

This study aims to analyze (1) the effect of asset inventory on the level of optimization of fixed assets owned by the municipal government of Parepare (2) the effect of legal audit on the level of optimization of fixed assets owned by the City of Parepare (3) the effect of assessment on the level of optimization of fixed assets owned by the government. Kota Parepare (4) the effect between supervision and control on the level of optimization of fixed assets belonging to the government of Parepare City.

The data collection method used was a questionnaire. The analytical method used is descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis.

The results of the study conclude that (1) there is a positive and significant influence between asset inventory on the level of optimality of fixed assets (land and buildings) belonging to the Parepare City government (2) a negative and insignificant effect between legal audit on the optimal level of fixed assets (land and building) owned by the Parepare City government (3) there is a positive and significant influence between the assessment of the optimal level of fixed assets (land and buildings) belonging to the Parepare city government (4) there is a positive and significant influence between supervision and control on the optimal level of fixed assets (land and buildings) belong to the government of Parepare City. This shows that the indicators of asset inventory, assessment and supervision as well as control directly affect the optimization of the Parepare City Government's assets while the indicators of legal audit do not affect it.

Keywords: *Asset Management and Asset Optimization*



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karna atas limpahan rahmat dan karunianyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis ini disusun sebagai bahan untuk penyelesaian Tesis dan syarat guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Magister Manajemen PPS STIE Nobel Indonesia yang berjudul: Pengaruh Manajemen Asset Terhadap Tingkat Optimalisasi Asset Tetap Pemerintah Kota Parepare.

Hingga penyelesaian tesis ini, penulis menyadari begitu banyak kendala yang dihadapi terutama keterbatasan ilmu dan kesempatan, namun dalam pelaksanaannya banyak pihak telah membantu sehingga penulis bisa menyelesaikan walaupun tak sesuai dengan ekspektasi. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada, dan secara khusus dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H., selaku Walikota Parepare yang telah memberikan Izin belajar.
2. Bapak Dr.H. Mashur Razak, S.E., M.M., selaku Ketua STIE Nobel Indonesia.
3. Dr. Maryadi, S.E., M.M., selaku Direktur PPs-STIE Nobel Indonesia yang memberikan kesempatan di dalam menempuh pendidikan di Pascasarjana STIE Nobel Indonesia Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Saban Echdar, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan tenaga dan waktunya untuk perbaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Deddy Rahwandi Rahim, S.Ip., M.M., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah dengan penuh kesabaran dalam memberikan saran, nasehat, bimbingan, kritikan, serta bantuan yang begitu besar.

6. Bapak Dr. Muhammad Idris, S.E., M.Si., selaku Ketua Prodi Magister Manajemen PPs STIE Nobel Indonesia Makassar.
7. Bapak Dr. Salim Sultan, M.M., yang senantiasa memberikan motivasi hingga selesainya tesis ini.
8. Bapak Jamaluddin Achmad, S.E., M.M., selaku Kepala Badan Keuangan Daerah yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan Tesis ini.
9. Bapak Agussalim, S.E., M.M., selaku Sekretaris Badan Keuangan Daerah.
10. Bapak Noldy Y Rengkuan, S.E., M.M., selaku Pimpinan Langsung yang telah membantu baik berupa materi dan tenaga.
11. Bapak/Ibu Dosen dan Staf STIE Nobel Indonesia Makassar.
12. Terkhusus kepada Orang Tua dan Anakku tercinta yang setiap saat ditinggalkan selama proses perkuliahan hingga selesainya tesis ini serta telah memberikan dukungan dan doa.
13. Sahabatku Nanang Sulolipu, S.Sos., yang telah banyak membantu dan mengorbankan tenaga dan waktunya demi penyelesaian tesis ini.
14. Seluruh teman-teman STIE Nobel Makassar.
15. Seluruh rekan dan sahabatku yang tidak bisa dipaparkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan tesis ini bukanlah akhir dari suatu penelitian, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan tesis ini, dan penulis berharap semoga tesis ini bisa bermanfaat, Aamiin.

Makassar, Februari 2020

Penulis,

R A M L A H

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN IDENTITAS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Pengertian Asset.....	19
2.3 Manajemen Asset	20
2.3.1 Konsep Manajemen Asset.....	20
2.3.1.1 Inventarisasi Asset.....	23
2.3.1.2 Legal Audit	26
2.3.1.3 Penilaian Asset	27
2.3.1.4 Pengawasan dan Pengendalian.....	30

2.3.2	Prinsip Dasar Manajemen Asset.....	30
2.3.3	Asset Properti	33
2.3.4	Optimalisasi Asset	35
BAB III	KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
3.1	Kerangka Konseptual	37
3.2	Hipotesis Penelitian.....	41
3.3	Defenisi Operasional Variabel.....	41
BAB IV	METODE PENELITIAN	
4.1	Pendekatan Penelitian	45
4.2	Tempat dan Waktu Penelitian	45
4.3	Populasi dan Sampel.....	45
4.4	Jenis dan Sumber Data.....	46
4.5	Teknik Pengumpulan Data.....	47
4.6	Instrumen	48
4.6.1	Uji Validitas dan Reabilitas	48
4.6.2	Uji Asumsi Klsik.....	49
4.7	Skala Pengukuran Variabel	51
4.8	Teknik Analisis Data	52
4.8.1	Analisis Regresi Berganda	52
4.8.2	Unstandardized Beta Coefficients	53
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1	Hasil Penelitian.....	55
5.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	56
5.1.2	Pengujian Instrumen	56
5.1.3	Skala Likert (Hasil Persepsi Responden)	61
5.1.4	Deskripsi Responden.....	63
5.1.5	Deskripsi Variabel Penelitian	65
5.1.6	Hasil Regresi.....	78
5.1.7	Uji Asumsi Klasik.....	84
5.2	Pembahasan Hasil Penelitian	88

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	92
6.2 Saran.....	93
6.3 Keterbatasan Penelitish	94

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Inventarisasi.....	56
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Legal Audit	57
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Penilaian	58
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan	58
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Optimalisasi asset	59
Tabel 6. Hasil Uji Reabilitas Instrumen Penelitian	60
Tabel 7. Rekapitulasi Jawaban Responden.....	61
Tabel 8. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	63
Tabel 9. Distribusi Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	64
Tabel 10. Distribusi Frekuensi Variabel Inventarisasi	65
Tabel 11. Distribusi frekuensi variable legal audit	68
Tabel 12. Distribusi frekuensi Variabel Penilaian	72
Tabel 13. Distribusi frekuensi Pengawasan dan Pengendalian.....	74
Tabel 14. Distribusi frekuensi Optimalisasi Asset.....	76
Tabel 15. Output Hasil Analisis Regresi Berganda.....	78
Tabel 16. Hasil Uji Koefisien Determinasi	79
Tabel 17. Hasil Uji Signifikansi Simultan	80
Tabel 18. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual	82
Tabel 19. One Sampel Kolmogorov.....	85
Tabel 20. Hasil Uji Multikolinearitas	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian	40
Gambar 5.1 Grafik Scatter Plot	87

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SURAT IZIN PENELITIAN

LAMPIRAN 2. KUESIONER PENELITIAN

LAMPIRAN 3. TABULASI DATA RESPONDEN

LAMPIRAN 4. PENGOLAHAN DATA PENELITIAN

a. Hasil Tanggapan Responden

b. Uji Regresi Berganda

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah mengacu pada segala hak dan kewajiban suatu daerah yang dapat dinilai dalam bentuk uang, termasuk segala jenis kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Pemerintah daerah secara implisit dituntut untuk mandiri dalam setiap aspek pembangunan termasuk aspek pendanaan daerah dalam menata dan mengurus rumah tangganya, khususnya di bidang keuangan dimana kemampuan mengelola keuangan sangat mempengaruhi pembangunan daerah. Dalam menjalankan Otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, pemerintah daerah diharapkan agar lebih mandiri terutama dalam setiap urusan pemerintahan.

Indonesia telah memasuki paradigma baru dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001, dimana salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya dan menjadikan dasar. perubahan pengelolaan wilayah. Akibat peralihan fungsi yang semula dilakukan oleh pemerintah pusat, kemudian dialihkan kepada pemerintah daerah, otonomi daerah telah mengakibatkan peningkatan kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan aset

yang semula ditangani oleh pemerintah pusat kemudian dijalankan oleh pemerintah daerah, merupakan contoh pergantian kewenangan.

Terkait dengan Otoritas Pengelolaan Aset Daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat menyiapkan instrumen yang tepat untuk pelaksanaan pengelolaan aset daerah secara transparan, profesional, efisien, efektif dan akuntabel, mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pengawasan. Pengelolaan aset daerah memiliki beberapa tahapan yaitu perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, distribusi, penggunaan, pemeliharaan, dan eliminasi. Setiap tahapan yang dilakukan akan dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah dan harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada publik pada tahap ini melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan oleh karena itu harus dikelola secara optimal sebagai bagian dari kekayaan Negara, intinya. aset daerah yang ada. Prinsip transparansi publik yang dapat dipertanggungjawabkan serta efisiensi dan efektivitasnya diperhitungkan (Siregar, 2004).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan perubahan sistem pemerintahan daerah dan termasuk perimbangan keuangan Negara. Perubahan itu mengacu kepada pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah yang luas, nyata serta

bertanggungjawab. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut diatas mempunyai fungsi menghilangkan, mengharmoniskan, ketidakseimbangan, dan ketidakberdayaan daerah akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah dan telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus. urusan pemerintahan sendiri-sendiri sesuai dengan asas otonomi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah Sumber-sumber pendanaan pemerintah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan ekonomi daerah sebagai perwujudan asa desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang dapat bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil pajak daerah, dan lainnya.

Dalam pelaksanaan UU No 32 dan UU No 33 Tahun 2004, dimana daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk menguasai ibukota yang ada. Selain itu, dalam mendanai sebagian besar anggaran pembangunan mereka, dewan daerah diharapkan bersifat otonom. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus dapat membimbing dan memungkinkan penggunaan sumber daya yang ada secara maksimal dan berhasil serta dapat memaksimalkan sumber pendapatan daerah, termasuk optimalisasi dan penggunaan properti yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, aset adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dengan biaya APBN / D atau yang berasal dari perolehan lain. Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2009) aset dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu aset yang ada dan aset yang akan dimiliki. Dengan kata lain harta adalah barang yang dalam pengertian hukumnya disebut benda yang terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik tidak berwujud maupun berwujud, yang termasuk dalam suatu badan, badan hukum, orang atau kekayaan badan usaha atau harta benda. Aktiva tetap atau sumber daya berwujud adalah barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan operasional pemerintahan. Aset tetap terdiri dari tanah, jalan dan jembatan, kendaraan, fasilitas dan jaringan, gedung untuk air, gedung untuk mesin dan perlengkapan, furnitur dan perlengkapan, dan buku untuk perpustakaan.

Pengertian real estat adalah suatu bentuk pengelolaan aset, yaitu hak badan hukum atau orang yang mempunyai pengertian memiliki tanah yang dikuasai suatu harta, yaitu hak untuk menggunakan atau memiliki hak milik atas bangunan, termasuk bangunan (permanen) yang didirikan. di atas atau tanpa gedung. Definisi penguasaan di atas perlu dibedakan antara penguasaan fisik atas tanah dan / atau bangunan yang dikenal dengan istilah real estate. Sedangkan property yang sebenarnya sebagai istilah hukum berdasarkan hak atas tanah adalah penguasaan (Siregar, 2004).

Kewenangan yang harus dilakukan Pemerintah daerah dan perlu memahami sehingga dapat mengoptimalkan asset-asset yang dimiliki guna peningkatan pendapatan asli daerah dalam hal ini asset tetap tanah dan bangunan. Pemerintah daerah juga harus bisa memaksimalkan kekayaan daerahnya melalui pengelolaan aset, misalnya. Dalam pengelolaan aset, gangguan dalam pengelolaan data aset merupakan salah satu masalah utama dalam pengelolaan aset daerah. Hal ini membuat pemda tidak mungkin mengetahui secara pasti aset yang ditangani, artinya aset yang dikelola oleh pemerintah daerah terkesan belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam pengelolaan aset, menurut Siregar (2004: 518-519), beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aset, yaitu inventarisasi aset, audit hukum, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pemantauan dan pengendalian aset. Untuk memastikan bahwa pengelolaan aset memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerja, efektivitas, dan nilai tambah sekaligus menangani aset secara tertib dan transparan, maka kelima tahapan pengelolaan tersebut harus dilakukan dengan baik.

Karena proses fisik dan hukum pengelolaan barang milik daerah belum dilaksanakan secara memadai dan benar, pemerintah daerah juga menghadapi masalah penilaian aset. Aset yang ditangani oleh pemerintah daerah tampak belum maksimal jika pengelolaan database aset tidak tertib. Dalam penggunaannya. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam optimalisasi dan eksploitasi sumber daya potensial. Konsekuensi dari penggunaan pengelolaan aset yang tidak optimal adalah misalnya nilai yang terdapat pada aset itu sendiri

tidak diperoleh dari sudut ekonomis, pendapatan yang sepadan dengan nilai aset yang dimiliki tidak diperoleh atau sebaliknya. Dengan kata lain, tingkat pengembaliannya rendah.

Hingga Tahun 2019 pemerintah kota Parepare memiliki 847 bidang tanah yang belum disertifikasikan, hal ini berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Pada saat penyusunan laporan keuangan, pelaporan aset yang selalu menjadi kendala dimana hal tersebut disebabkan oleh keterlambatan masing-masing SKPD merampungkan laporan aset pada tahun berkenaan.

Kajian manajemen aset yang berbeda telah dilakukan pada beberapa studi sebelumnya, salah satunya dilakukan oleh Pakiding (2006) dalam studinya tentang pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan). Temuan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan aset sangat dipengaruhi oleh inventaris dan penilaian aset dalam memaksimalkan aset tetap (tanah dan bangunan). Variabel Studi kasus yang dilakukan dalam penelitian menggunakan variabel dari inventarisasi, identifikasi, audit hukum dan evaluasi. Sampel yang digunakan sebanyak 40 individu dengan menggunakan metode purposive sampling. Menggunakan statistik deskriptif, korelasi peringkat Spearman dan dihitung dengan regresi logistik multinomial, metode yang digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen diukur. Pengakuan

otonom dan audit hukum lainnya memiliki pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bohn (2002) memperoleh hasil dan menyimpulkan bahwa saham pendapatan tetap yang memenuhi kualitas tertinggi (high-quality fixed-income securities) merupakan patokan (benchmark) terbaik dan jaminan sosial yang paling diminati oleh manajer asset pemerintah, tentang pilihan berbagai alternative manajemen terhadap hutang dan asset pemerintah dalam suatu neraca keuangan yang meliputi kekayaan (treasury) the Federal Reserve, serta jaminan sosial. Menelaah besarnya dana yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, Ketua (2001) melakukan studi kasus tentang peran manajemen dalam upaya peningkatan penggunaan aset tanah dan bangunan untuk mendorong pemberlakuan otonomi daerah di daerah DKI Jakarta. pemerintah. Dalam penelitiannya, ia berupaya untuk mengetahui faktor-faktor yang terkait dengan kemajuan status pengelolaan aset daerah. Analisis klaster merupakan pendekatan yang digunakan, dan temuan yang diperoleh adalah adanya tingkat operasi yang tinggi dalam pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan aset tanah dan bangunan, serta variasi kinerja pengelolaan aset kecamatan berdasarkan luas lahan dan bangunan yang dimiliki.

Dalam penelitiannya tentang pengelolaan pengelolaan aset real estat pada perusahaan kawasan pasar jaya, Phahlevi (2002) memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara status pengelolaan aset real estat yang dibentuk dari analisis cluster

berdasarkan pasar. variabel klasifikasi unit, pendapatan kotor, jumlah karyawan, dan jumlah lantai. Bertovic, et al (2002) menjelaskan bagaimana studi kasus pemerintah daerah di Kroasia merupakan teknik penerapan manajemen aset secara bertahap, beserta beberapa masalah yang harus diwaspadai selama implementasi dan solusi praktisnya. Di Negara New Zealand (2001) pengelolaan aset tetap dikelola oleh suatu departemen tersendiri (the treasury) dan telah menetapkan garis-garis besar strategi serta mengeluarkan pedoman dan prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan akuisi dan manajemen aset tetap.

Penelitian dan kajian telah dilakukan oleh Ciptono dan Wirawan (2001) untuk menjelaskan implementasi strategi real-time dengan mengambil contoh dari praktek corporate real estate asset management (CREAM) di Indonesia yang menggunakan metode analisis cluster sebagai analitik. alat. Masyarakat dan organisasi bisnis harus mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitasnya dalam era transisi nasional dan otonomi daerah, agar dapat melakukan proses perubahan secara kreatif dan berkesinambungan untuk menjadi pemimpin krisis. Agustina (2005) yang melakukan studi kasus tentang pengelolaan aset (tanah dan bangunan) di Kabupaten Pontianak. (layanan kepada publik).

Mahsun (2003) yang melakukan studi kasus dengan subjek penelitian Pemerintah Kota Yogyakarta 2001/2002, mengkaji efektifitas pengelolaan aset real estate oleh pemerintah daerah dengan menggunakan metode, yaitu pertama dengan melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah daerah, kedua dengan

melakukan observasi lingkungan. Dengan melakukan penelaahan data baik laporan pertanggungjawaban maupun pustaka akademik, maka Pemprov dan yang ketiga melakukan penelaahan data dan memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa praktik pengelolaan aset masih belum optimal di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, karena Pemprov masih belum optimal. tidak memiliki kapasitas manajemen aset yang memadai. Dimiliki terutama oleh aset-aset besar, selanjutnya Dadson et.al (2006) juga menjelaskan tentang mengoptimalkan manajemen asset tanah di Ghana dalam rangka menuju good governance dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan hal tersebut berada di seputar legislasi, organisasi dalam sektor tanah, data base dan pets serta mekanisme sistem lahan yang berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan, studi empirik, uraian teoritis, serta fakta yang terjadi diatas, dimana antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain terjadi perbedaan atas hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh Manajemen asset terhadap tingkat optimalisasi asset tetap Pemerintah Kota Parepare.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Adakah pengaruh positif antara inventarisasi asset terhadap tingkat optimalisasi asset tetap milik pemerintah Kota Parepare?

2. Adakah pengaruh positif antara legal audit terhadap tingkat optimalisasi asset tetap milik pemerintah Kota Parepare?
3. Adakah pengaruh positif antara pengawasan dan pengendalian terhadap tingkat optimalisasi asset tetap milik pemerintah Kota Parepare?
4. Adakah pengaruh positif antara penilaian terhadap tingkat optimalisasi asset tetap milik pemerintah Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh inventarisasi terhadap optimalisasi asset tetap (tanah dan bangunan) pemerintah Kota Parepare.
2. Untuk menganalisis pengaruh legal audit terhadap optimalisasi asset tetap (tanah dan bangunan) pemerintah Kota Parepare.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan dan pengendalian asset terhadap optimalisasi asset tetap (tanah dan bangunan) pemerintah Kota Parepare.
4. Untuk menganalisis pengaruh penilaian terhadap optimalisasi asset tetap (tanah dan bangunan) pemerintah Kota Parepare.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam rangka menentukan kebijakan guna meningkatkan Otimalisasi pengeloan pengelolaan asset khususnya asset tetap.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan manajemen asset pemerintah daerah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat memberikan gambaran atas kelayakan penelitian tentang pengaruh manajemen asset terhadap tingkat optimalisasi asset tetap pemerintah kota Parepare, selain itu dimaksudkan pula untuk memberi gambaran serta sebagai alat pembanding dalam penelitian baik terhadap masalah dan hasil dari penelitian. Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan:

1. Etik Winarni, Yolanda Sari (2020), pengelolaan asset yang baik akan berkontribusi bagi pemerintah daerah, sebaliknya jika pengelolaannya buruk, maka akan berdampak buruk pada pemerintah daerah. Peneliti mengangkat judul “ Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang (barang milik Negara) di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2017-2018. Dalam penelitiannya diperoleh hasil yaitu Hipotesis pertama menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara perencanaan terhadap tingkat optimalisasi pengelolaan asset/barang pada kantor dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Hipotesis kedua menyatakan bahwa memiliki pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan terhadap tingkat optimalitas pengelolaan asset/barang pada kantor dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi Jambi, Hipotesis ketiga menyatakan bahwa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan antara

pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tingkat optimalitas pengelolaan asset/barang pada kantor dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, analisis data yang digunakan adalah Uji validitas dan reabilitas dan analisis regresi berganda.

2. Widayanti (2010), dengan judul Penelitian Dampak Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten (studi kasus Kabupaten Sragen). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh pengelolaan aset yang terdiri dari aspek inventarisasi, identifikasi dan legal audit, serta aspek evaluasi aset terhadap optimalisasi aset pemerintah daerah di Kabupaten Sragen. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diambil 52 responden dari staf Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan berbagai metode untuk analisis data regresi. Temuan penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa inventarisasi, identifikasi dan evaluasi variabel berpengaruh terhadap optimalisasi aset pemerintah di Kabupaten Sragen.
3. Hanis, Tringunarsyah, dan Susilawati (2011) melakukan penelitian untuk mengenali permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia saat menerapkan sistem pengelolaan aset publik. Rencana / strategi / teknik. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, studi kasus di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan digunakan sebagai pendekatan. Dua teknik pengumpulan data wawancara dan analisis dokumen dilibatkan dalam

studi kasus ini. Temuan studi menunjukkan bahwa ketika mengadopsi kerangka kerja pengelolaan aset publik, terdapat tantangan signifikan yang perlu dikelola oleh pemerintah daerah Indonesia. Tantangan tersebut antara lain kurangnya kelembagaan dan kerangka hukum untuk mendukung penggunaan manajemen aset, prinsip aset publik nirlaba, tidak adanya sejumlah yurisdiksi yang terlibat dalam proses pengelolaan aset publik, kompleksitas tujuan pemerintah daerah, tidak tersedianya data dan sumber daya pengelolaan properti publik. manusia terbatas. Batasan / konsekuensi studi penelitian ini dibatasi pada satu studi kasus. Penelitian ini merupakan studi pendahuluan dengan beberapa studi kasus menggunakan studi yang lebih besar. Riset utama juga mengkaji peluang bagi pemerintah daerah dengan mengadopsi dan menerapkan manajemen aset publik sehingga menghasilkan organisasi yang efisien dan efektif, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Di negara berkembang lainnya, studi ini memiliki aplikasi potensial.

4. Wahyuni (2012), dengan judul penelitian Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengelolaan aset yang terdiri dari aspek inventarisasi, identifikasi, legal audit dan penilaian aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Sampel dipilih dengan menggunakan purposive sampling, diperoleh

53 responden dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan 8 satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk sebagai instansi teknis daerah yang mempunyai target pencapaian pendapatan daerah. 2 (dua) metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk analisis regresi berganda menggunakan software komputer Eviews versi 6.00 dan Data Envelopment Analysis (DEA) menggunakan software komputer Warwick DEA (WDEA). Untuk menguji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dilakukan analisis data. Pengujian regresi berganda menunjukkan bahwa variabel inventaris, pengakuan dan audit egal berpengaruh positif dalam memaksimalkan penggunaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

5. Antoh (2012), melakukan penelitian manajemen aset untuk leverage aset tetap (tanah dan bangunan) pada pemerintah daerah Kabupaten Paniai. Jumlah sampel penelitian yang diambil sebanyak 50 responden melalui proses purposive sampling. Inventaris aset, audit aset hukum, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset adalah variabel yang digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa persediaan aset individu belum terbukti berdampak positif dan bermakna terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode uji Regresi Linier Berganda, yang mengandung pengertian bahwa tidak sejalan dengan hipotesis. Secara individu, audit aset hukum terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap tanah dan bangunan,

penilaian aset secara individu belum terbukti berdampak positif terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan). bangunan), pemantauan dan pengendalian aset telah terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap tanah dan bangunan. Analisis bersama / konkuren menunjukkan bahwa empat variabel yaitu inventaris aset, audit aset hukum, evaluasi aset dan pemantauan dan pengendalian aset, berdampak besar / positif terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan), yang ditunjukkan dengan nilai $F\text{-hitung} > F\text{-Tabel}$.

6. Jusmin (2013), dengan judul pengaruh manajemen aset terhadap tingkat optimalitas aset tetap (tanah dan bangunan) Pemerintah Kota Baubau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen aset terhadap tingkat optimalitas aset tetap (tanah dan bangunan) pada Pemerintah Daerah di Kota Baubau. Dengan menggunakan metode purposive sampling. 48 responden termasuk dalam jumlah sampel penelitian yang diambil. Inventaris aset, audit aset hukum, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset adalah variabel yang digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa persediaan aset individual telah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan), berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode uji regresi linier berganda yang menunjukkan bahwa sesuai dengan hipotesis audit hukum individu, aset tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi. Aktiva tetap (tanah dan bangunan), menunjukkan

bahwa tidak sejalan dengan hipotesis bahwa secara terpisah penelitian aset terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat optimalisasi aktiva tetap (tanah dan bangunan), sedangkan aset pengawasan dan pengendalian telah terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat optimal aset tetap (dan bangunan). Sementara itu, hasil analisis simultan menunjukkan bahwa empat variabel yaitu persediaan aset, audit aset hukum, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset terbukti berpengaruh signifikan / positif. pada tingkat optimal aset tetap (tanah dan bangunan), yang dibuktikan dengan nilai $F_{Hitung} > F_{Tabel}$.

7. Nasution, dkk (2015), dengan judul penelitian pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi aset rumah sakit jiwa daerah provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen aset di Provinsi Sumatera Utara terhadap Rumah Sakit Jiwa. Seluruh seksi di Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Sumatera Utara menjadi populasi penelitian ini yaitu pada seksi Evaluasi dan Pengembangan, Keuangan, Administrasi, Kepegawaian Instalasi Laboratorium, Penunjang Medik, dan Instalasi Fasilitas Perawatan Rumah Sakit, secara keseluruhan. dari 40 orang. Sebagai sampel penelitian, seluruh populasi digunakan. Penelitian dilakukan antara Juli 2013-Juli 2014. Pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan kuesioner, observasi dan telaah dokumen. Hasil analisis uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa, sebagian variabel persediaan aset, audit hukum, dan penilaian aset terbukti memiliki pengaruh positif dan

substansial terhadap optimalisasi aset. Secara bersama-sama / bersamaan, temuan studi menunjukkan bahwa aset telah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan / positif terhadap optimalisasi aset.

8. Tangke (2015), dengan judul penelitian pengaruh optimalisasi manajemen asset daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh optimalisasi manajemen asset daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian korelatif. Populasi adalah pengelola barang dan kepala sub bagian perlengkapan di 52 Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan sampel sebanyak 104 orang responden ditetapkan secara purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan uji normalitas, analisis regresi, dan uji hipotesis dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian memperlihatkan optimalisasi manajemen asset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. hal ini dilihat dari nilai regresi yang menunjukkan angka positif sebesar 0,293 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Untuk itu, sebaiknya pemerintah Kota Makassar serius menindaklanjuti semua rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan BPK terutama mengenai permasalahan manajemen asset tetap.

2.2 Pengertian Asset

Definisi umum aset adalah sesuatu yang memiliki nilai adalah aset. Dalam terminologi akuntansi, aset dapat didefinisikan, menurut Buku Standar Penilaian Indonesia (SPI, 2007: 3), sebagai sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh suatu badan usaha atau pemerintah yang secara historis telah memberikan manfaat ekonomi dan / atau sosial dan dapat diperoleh di masa depan, dan dapat diukur dalam satuan uang. Selanjutnya jika dilihat dari aspek asset management & valuation, konsep asset bercirikan segala sesuatu yang dimiliki secara legal dan mampu mendongkrak nilai dan pertumbuhan sumber daya.

Menurut Siregar (2004), aset dalam arti hukum adalah barang atau benda, terdiri dari benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) dan benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang termasuk dalam aset / kekayaan atau kekayaan suatu perusahaan, badan usaha, , institusi atau individu.

Siregar (2004) menyatakan bahwa aset dapat berupa benda atau benda yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial dan nilai tukar yang dapat dimiliki oleh badan usaha, instansi atau perseorangan (perseorangan). Definisi kekayaan di atas juga pada dasarnya berlaku, atas dasar kondisi tertentu, terhadap kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh Negara.

Selain kedua definisi yang dikemukakan di atas, Siregar (2004) juga menyatakan bahwa kekayaan negara adalah bagian dari kekayaan negara atau kekayaan negara (HKN) yang terdiri dari harta bergerak atau tidak bergerak yang

dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah, diperoleh sebagian atau seluruhnya dan diperoleh secara sah. dengan mengorbankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak termasuk aset Negara yang terpisah dan perolehan kembali. Singkatnya, ini bisa disebut milik Negara atau properti Negara.

Menurut Hidayat (2011) asset adalah benda baik itu benda yang berwujud (tangible) maupun benda yang tidak berwujud (intangible), bergerak ataupun tidak bergerak keseluruhan dari hal tersebut mencakup asset dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun dari individu perorangan.

2.3 Manajemen asset

2.3.1 Konsep manajemen asset

Surminah (2008) menyatakan bahwa manajemen aset adalah sistem manajemen atau unit fungsional yang mempunyai fungsi atau tugas untuk mengoperasikan sekumpulan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, uang, mesin, barang atau waktu dan mengoperasikan sekumpulan instrumen seperti metode, standar atau kriteria bertujuan untuk mencapai satu tujuan.

Mahsun (2003) mengatakan bahwa manajemen asset sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan property di lingkungan pemerintah daerah untuk mencerminkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Permasalahan yang sering dijumpai dalam pengelolaan asset property adalah masalah status hukum property. Masalah hak kepemilikan yang tidak jelas sering menjadi sengketa di antara unit-unit yang ada. Selain itu kurangnya kebudayaan efisiensi untuk manajemen asset

ini mengakibatkan berbagai hubungan perjanjian menjadi tidak optimal serta tidak adanya hubungan yang relevan antara Pemerintah daerah sebagai pemilik dengan para penyewa dan manajer.

Menurut Lukman dan Akbar (2010) konsep pada manajemen asset pertama kali dicetuskan oleh industry privat dan penerapan konsep manajemen asset telah terbukti memberikan hasil positif dan menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan sektor privat. Kesuksesan sektor privat ini mulai dilirik oleh aparaturnya pemerintah dan perusahaan-perusahaan publik. Oleh karena itu, konsep manajemen asset mulai dikenali sebagai suatu cara yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam mengelola asset-asset yang dimiliki.

Menurut Siregar (2004) tahapan manajemen asset daerah sebagai berikut:

1. Inventarisasi Asset, yang terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen asset.
2. Legal audit, merupakan satu lingkup kerja manajemen asset yang berupa inventarisasi status penguasaan asset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan asset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal terkait dengan

penguasaan atau pengalihan asset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, asset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan asset yang tidak termonitor, dan lain-lain.

3. Penilaian asset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas asset yang dikuasai dan hasil penilaiannya akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan dan informasinya digunakan untuk penerapan harga bagi asset yang ingin dijual.
4. Optimalisasi asset, adalah satu proses kerja didalam manajemen asset yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legal dan ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas asset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Asset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Asset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan asset yang dikuasai.
5. Pengawasan dan pengendalian aset merupakan salah satu isu yang sering dikritik oleh pemerintah daerah saat ini, dan salah satu cara efektif untuk

meningkatkan kinerja aspek tersebut adalah dengan mengembangkan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset terjalin dengan sangat baik tanpa perlu pengawasan dan masalah kontrol yang lemah. Dalam SIMA, dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian, keempat aspek tersebut dapat diakomodir dalam sistem, sehingga setiap penanganan suatu aset terpantau secara jelas, mulai dari cakupan penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab untuk menanganinya. KKN di pemerintah daerah seharusnya dikurangi dengan ini.

2.3.1.1 Inventarisasi Asset

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, disebutkan bahwa inventarisasi adalah suatu operasi atau tindakan untuk pengukuran, pengelolaan, penatausahaan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan. barang yang digunakan. Barang Persediaan adalah semua barang yang dimiliki / dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memiliki izin dan terdaftar dalam buku persediaan untuk pemakaian lebih dari satu tahun. Pelaksanaan buku inventaris harus lebih tertib, tertib dan berkelanjutan, berdasarkan data yang nyata, lengkap dan terpercaya sehingga dapat memberikan informasi yang akurat agar dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan perannya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang daerah, inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

kegiatan pencatatan dimaksud digunakan buku-buku dan kartu-kartu sebagai berikut :

1. Buku Induk Inventarisasi (BII)
2. Buku Inventarisasi (BI)
3. Kartu Inventarisasi Barang (KIB)
4. Kartu Inventarisasi Ruangan (KIR)

Dalam pelaksanaan pelaporan dipergunaan daftar-daftar yaitu :

1. Daftar rekapitulasi (jumlah barang hasil sensu, daftar mutasi barang)
2. Daftar mutasi barang

Campuran / kumpulan buku inventaris adalah buku induk inventaris. Buku inventaris adalah kumpulan catatan data teknis dan administrasi yang diperoleh dari inventaris barang hasil survei yang dilakukan secara bersamaan pada waktu tertentu di setiap unit / unit kerja. Hal tersebut dapat dilakukan melalui sensus barang daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memperoleh data barang dan melakukan pembukuan inventaris yang benar, dapat dipertanggungjawabkan dan akurat (up to date).

Buku persediaan barang adalah kartu untuk mendokumentasikan barang persediaan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, lengkap dengan informasi asal usul, volume, kemampuan, merek, jenis, nilai / harga dan informasi lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk persediaan atau keperluan lain dan digunakan untuk barang yang belum dihapuskan. Kartu inventarisasi barang terdiri dari :

1. kartu inventarisasi tanah
2. kartu inventarisasi gedung
3. kartu inventarisasi kendaraan
4. kartu inventarisasi lainnya

Kartu Inventaris Kamar adalah kartu di ruang kerja untuk melacak item inventaris. Anda harus memasang kartu inventaris ruangan ini di setiap ruang kerja. Manajer produk untuk setiap fasilitas / unit kerja bertanggung jawab untuk memasang dan mencatat inventaris.

Dengan menggunakan bahan yang berasal dari rekapitulasi persediaan barang yang disusun oleh pengelola barang unit, Kepala Daerah menyusun daftar rekapitulasi persediaan sebagai kekuatan barang. Daftar mutasi barang meliputi data barang yang mengalami penurunan atau peningkatan dalam jangka waktu tertentu. Karena akuisisi / bangunan, sumbangan / hibah, pertukaran dan peningkatan dalam peningkatan kualitas (untuk penumpukan), peningkatan pergerakan produk dapat dipicu oleh pengadaan baru. Dengan dijual / dihapuskan, dihancurkan / hilang / mati, disumbangkan / disumbangkan, dan ditukar / ditukar / dilepaskan untuk kompensasi, pergerakan barang yang dikurangi dapat diinduksi.

Kodefikasi adalah ketentuan pengkodean produk yang menunjukkan kode lokasi dan kode barang pada setiap barang inventaris milik pemerintah daerah. Tujuan pemberian kodifikasi adalah agar setiap konsumen mengamankan dan memberikan klarifikasi status kepemilikan dan status penggunaan produk.

Inventarisasi asset/barang milik daerah yang berupa tanah dan bangunan yang dalam penguasaan pemerintah daerah, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

2.3.1.2 Legal audit

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman pengelolaan barang daerah, legal audit juga merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitikberatkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan administrasi sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan barang daerah, legal audit merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitikberatkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan secara administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan secara fisik dan secara administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. Pengamanan secara fisik terhadap barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dapat dilakukan dengan pemagaran, pemasangan papan tanda kepemilikan dan penjagaan. Pengamanan secara administrative dapat dilakukan dengan cara

penyelesaian bukti kepemilikan seperti IMB, berita acara serah terima, surat perjanjian akte jual beli, dan dokumen pendukung lainnya.

2.3.1.3 Penilaian Asset

Penilaian asset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas asset yang dikuasai dan hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi asset yang akan dijual. Penilaian dilakukan secara independen berdasarkan kompetensi yang dimiliki.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penilaian Barang Daerah, disebutkan bahwa tujuan penilaian Barang Daerah meliputi seluruh Barang Daerah yang dimiliki dan bernilai ekonomis oleh Pemerintah Daerah. Untuk penilaian tanah menggunakan harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP), penilaian bangunan menggunakan umur ekonomis, faktor fisik, bahan bangunan dan ciri bangunan, dihitung kriteria evaluasi. Penilaian barang daerah dinilai atas dasar nilai pasar yang berlaku pada saat penilaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 Nomor 19 Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Peraturan Nomor 19 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2016

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dalam rangka penyusunan neraca pemerintahan perlu diketahui baik kekayaan negara maupun nilai kekayaan tersebut. Untuk mengetahui nilainya, aset negara harus diukur secara teratur baik oleh manajer produk atau oleh penilai yang tidak memihak untuk menghitung dengan benar nilai aset negara. Penilaian tersebut menggunakan benchmark nilai jual pos pajak (NJOP) berupa tanah dan / atau bangunan.

Asset assessment adalah metode kerja untuk mengevaluasi properti yang dikelola, menurut Siregar (2004). Pemerintah daerah harus mengalihdayakan konsultan penilai yang terampil dan independen untuk tujuan ini. Pengaruh nilai ini akan digunakan untuk tujuan menentukan nilai aset dan untuk tujuan menentukan aset yang akan dijual.

Penilaian barang daerah dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan. Perbandingan data pasar berdasarkan estimasi harga pasar pada saat penilaian atas barang yang sejenis. Kalkulasi biaya berdasarkan estimasi biaya pengganti atau biaya reproduksi barang pada saat penilaian dikurangi dengan biaya penyusutan. Kapitalisasi pendapatan berdasarkan barang daerah yang memiliki karakteristik menghasilkan pendapatan. Penilaian barang daerah dilaksanakan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian barang, sesuai dengan peraturan perundangan, dan ditunjuk oleh Kepala Daerah. dalam melakukan penilaian barang daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan buku inventaris barang daerah yang merupakan himpunan data

teknis dan administrasi yang diperoleh dari catatan kartu-kartu inventaris barang sebagai hasil sensus barang daerah ditiap-tiap unit/satuan kerja yang dilaksanakan secara serempak pada waktu tertentu. Mekanisme penilaian barang sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI).

Suharno (2001) menyatakan bahwa penilaian asset tanah dan bangunan dapat mengetahui nilai ekonomi seluruh asset property suatu daerah. implikasinya secara langsung adalah terhadap penerimaan PBB dan BPHTB yang didasari pada nilai property. Secara tidak langsung nilai asset property berguna untuk:

1. Mengetahui nilai dalam rangka penerbitan obligasi daerah
2. Mengetahui nilai penyertaan (saham) dalam melakukan suatu kerjasama usaha dengan pihak swasta.
3. Mengetahui nilai dalam pembebasan tanah, pembelian tanah dan lain-lain.
4. Mengetahui kemampuan daerah secara utuh dan dasar penyusunan neraca daerah
5. Memberikan informasi kemampuan nilai ekonomi property disuatu daerah untuk mengundang investor
6. Mengetahui nilai asset untuk kepentingan tukar guling
7. Mengetahui modal dasar milik daerah dalam usaha privatisasi
8. Mengetahui nilai jaminan untuk memperoleh pinjaman

Penilaian real property dengan menentukan nilai pasar suatu property sehingga dapat digunakan untuk berbagai tujuan yaitu:

1. Penentuan harga persewaan

2. Revaluasi asset tetap untuk laporan keuangan
3. Menentukan nilai sisa untuk property
4. Penentuan besar saham (penyertaan modal) dalam suatu kerjasama usaha
5. Besarnya premi asuransi, kebakaran
6. Sebagai dasar pengenaan pajak property
7. Jaminan pinjaman
8. Nilai dasar untuk lelang property
9. Harga jual beli

2.3.1.4 Pengawasan dan pengendalian

Pengawasan dan pengendalian merupakan permasalahan yang sering dikritik oleh pemerintah daerah saat ini. Pembuatan SIMA merupakan salah satu cara yang berhasil untuk meningkatkan kinerja aspek ini. Akuntabilitas pekerjaan dalam manajemen aset dijamin oleh SIMA tanpa perlu adanya kekhawatiran tentang pengawasan dan kontrol yang buruk. Dalam SIMA ini, dengan memasukkan aspek pengawasan dan pengendalian ke dalam kerangka, keempat aspek tersebut diakomodasi, sehingga setiap penanganan suatu aset terkontrol dengan jelas, mulai dari sejauh mana penanganannya hingga kepada siapa yang bertanggung jawab untuk menanganinya. Di lingkungan pemerintah daerah, hal ini diharapkan dapat mengurangi KKN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah untuk menjamin kelancaran pengelolaan Barang Milik Daerah

secara efisien dan efektif, peran pengarahan, pengawasan dan pengawasan sangat diperlukan untuk menjamin terselenggaranya Barang Milik Daerah secara tertib. Pengendalian adalah suatu operasi untuk memastikan dan mengarahkan pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pengawasan adalah suatu upaya atau operasi, baik yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk menentukan dan menentukan realitas sebenarnya dari pelaksanaan tugas dan / atau kegiatan.

Pengawasan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh konsumen produk dengan cara pengawasan dan pengaturan dan pengelola barang dengan pengawasan dan penyidikan. Pengguna barang memantau dan mengontrol penggunaan, eksploitasi, pengalihan, pengelolaan, pemeliharaan, dan keamanan aset daerah. Pengawasan juga dapat dilakukan oleh aparat pengendalian intern pemerintah untuk melakukan investigasi lanjutan atas dampak pemantauan dan pengendalian yang dilakukan oleh konsumen produk.

2.3.2 Prinsip dasar manajemen asset

Aset dapat menjadi modal dalam Neraca Keuangan Daerah jika dapat menghasilkan pendapatan. Namun, masih banyak daerah yang belum menyadari peran dan potensi pengelolaan aset secara cermat. Sebagai komponen utama dari aset kota, real estat harus digunakan sebagai aset produktif dan berharga oleh pemerintah daerah agar dapat memberikan pengaruh yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa model

manajemen asset yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah daerah adalah (Bertovic et al.2002) :

1. Perencanaan strategis.
2. Mengembangkan sistem data base yang baik
3. Konsolidasi manajemen dan
4. Analisis finansial secara intensif terhadap proyek, property dan portofolio.
5. Adanya penilaian real estate dan penilaian bisnis
6. Memahami isu-isu transisi
7. Sistem pelaporan property
8. Adanya deregulasi bisnis persewaan
9. Pengklasifikasian terhadap property
10. Membuat aturan untuk property yang menghasilkan pendapatan

Harus dipahami oleh Pemerintah Daerah bahwa sasaran akhir atau tujuan utama pengelolaan asset adalah terjadinya optimalisasi dalam pemanfaatan asset daerah. Meskipun pengelolaan asset telah dilakukan secara optimal, namun kenyataannya masih terdapat kekurangan didalam pengelolaannya. Pelaporan asset sering kali menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan daerah, kemungkinan hal ini disebabkan oleh pengelolaan manajemen asset yang belum optimal.

Britton et.al. (1989 dalam Siregar 2004), mengatakan “define good asset management in terms of measuring the value of propertis in monetary terms and employing the minimum amount of expenditure on its management”. Manajemen

asset itu sendiri telah berkembang cukup pesat bermula dengan orientasi yang statis, kemudian berkembang menjadi dinamis, inisiatif, dan strategis.

Manajemen asset memiliki ruang lingkup utama mengontrol biaya pemanfaatan maupun penggunaan asset dalam mendukung operasionalisasi Pemerintah Daerah, selain itu ada upaya pula untuk melakukan inventarisasi asset-asset pemda yang tidak digunakan, namun dalam perkembangan ke depan, ruang lingkup manajemen asset lebih berkembang dengan memasukkan nilai asset, akuntabilitas pengelolaan asset, land audit yaitu audit atas pemanfaatan tanah, property survey dalam kaitan memonitor perkembangan pasar property, aplikasi sistem informasi dalam pengelolaan asset dan optimalisasi pemanfaatan asset. Perkembangan terbaru, manajemen asset bertambah ruang lingkungannya sehingga mampu memantau kinerja operasionalisasi asset dan juga strategi investasi untuk optimalisasi asset (Siregar, 2004).

2.3.3 Asset Properti

Pengertian aset secara umum adalah barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, badan atau individu. Jadi, untuk memiliki pengertian hukum yang lebih sederhana, termasuk real estat dan real estat, kata properti terkadang ditambahkan ke istilah lain, yang semuanya memiliki definisi yang berbeda, sementara beberapa menyebutnya sinonim di beberapa bidang. Selanjutnya real estate is the physical land and oppurtenances offixed to the land, e.g., structure. Real estate bersifat tidak bergerak dan berwujud, yang termasuk dalam pengertian adalah tanah,

semua benda yang secara alami sebagai bagian dari tanah seperti pepohonan dan barang mineral dan juga segala sesuatu yang dibangun oleh manusia seperti bangunan, jaringan dan lain sebagainya. Lebih lanjut real property includes all interest, benefits, and rights inherent in the ownership of physical real estate (Appraisal Institute 2001:8)

Real property merupakan kumpulan atas berbagai macam hak dan interest yang ada dikarenakan kepemilikan atas satuan real estate, meliputi hak untuk menggunakan, menyewakan, memberikan kepada orang lain atau tidak. Properti selain sebagai investasi, juga merupakan asset. Pengertian asset adalah sesuatu yang memiliki nilai. Pengertian asset bila diaitkan dengan property, maka dapat dijabarkan melalui beberapa aspek, antara lain sebagai berikut :

1. Memiliki nilai ekonomis yang terkait dengan nilai pemanfaatan dan terbaik.
2. Menghasilkan pendapatan dari pengoperasian property.
3. Memiliki fisik, fungsi dan hak penguasaan yang baik.
4. Economical life-time yang panjang.

Berdasarkan Himpunan Peraturan-peraturan tentang Inventarisasi Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI Badan Akuntansi Keuangan Negara 1995 pasal 2, disebutkan bahwa barang-barang milik Negara/kekayaan Negara yang termasuk jenis barang-barang tidak bergerak antara lain:

1. Tanah-tanah kehutanan, pertanian, perkebunan, lapangan olahraga dan tanah-tanah yang belum dipergunakan, jalan-jalan (tidak termasuk jalan

daerah), jalan kereta api, jembatan, waduk, lapangan terbang, bangunan-bangunan irigasi, tanah pelabuhan dan lain-lain tanah seperti itu.

2. Gedung-gedung yang dipergunakan untuk kantor, pabrik-pabrik, bengkel, sekolah, rumah sakit, studio, laboratorium dan lain-lain gedung seperti itu.
3. Gedung-gedung tempat tinggal tetap atau sementara seperti rumah-rumah tempat tinggal, tempat istirahat, asrama, pesanggrahan, bungalow dan lain-lain gedung seperti itu.
4. Monumen-monumen seperti, monument purbakala, monumen peringatan sejarah, dan monument purbakala lainnya..

Real estate sebagai komponen utama dari asset daerah, oleh pemerintah daerah selanjutnya harus dapat dimanfaatkan sebagai asset yang produktif dan berguna sehingga berdampak positif dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam neraca keuangan daerah asset dapat menjadi modal bila dapat menghasilkan pendapatan. Namun masih banyak daerah yang belum menyadari peran dan potensi pengelolaan asset secara cermat.

2.3.4 Optimalisasi Asset

Siregar (2004) mencatat bahwa pengoptimalan aset merupakan proses kerja pengelolaan aset yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, kuantitas / jumlah, hukum dan ekonomi dari properti tersebut. Pada titik ini, aset yang dikuasai pemerintah daerah dikategorikan dan dikelompokkan menjadi aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki kekuasaan. Aset potensial dapat dikelompokkan berdasarkan sektor unggulan, baik jangka pendek, menengah,

maupun panjang yang menjadi dasar strategi pembangunan ekonomi nasional. Parameter yang terukur dan langsung harus digunakan untuk menilai sektor unggulan. Jika penyebabnya adalah faktor hukum, fisik, nilai ekonomi rendah, atau faktor lain, maka aset yang tidak dapat dioptimalkan harus dicari penyebabnya. Biasanya, dewan kota memiliki properti yang berada di bawah yurisdiksinya. Namun, untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, masih ada sejumlah aset yang belum dimanfaatkan.

Siregar (2004) menyatakan studi optimalisasi aset pemerintah daerah dapat dilakukan dengan :

1. Identifikasi asset-asset pemerintah daerah yang ada,
2. Pengembangan data base asset pemerintah daerah
3. Studi untuk menentukan pemanfaatan asset dengan nilai terbaik atas asset-asset pemerintah daerah serta memberikan hasil dan laporan kegiatan baik dalam bentuk data-data terkini maupun dalam bentuk rekomendasi
4. Pengembangan strategi optimalisasi asset-asset milik pemerintah daerah.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

3.1.1. Pengaruh inventarisasi terhadap tingkat optimalisasi asset tetap

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, inventarisasi merupakan suatu penyelenggaraan pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Inventarisasi pengelolaan tanah dan / atau bangunan harus dilakukan minimal 1 (satu kali) setiap lima tahun. Sebuah buku inventaris yang mencantumkan semua properti daerah tersebut, baik yang bergerak maupun tidak dapat dipindahkan, dapat dikumpulkan.

Buku inventaris memuat data yang terdiri dari nomor, spesifikasi barang, asal/cara perolehan barang, jumlah barang, harga dan keterangan. Kegiatan inventarisasi dapat melakukan pencatatan dan pelaporan. Dengan pelaksanaan inventarisasi yang baik maka akan mengoptimalkan pengelolaan asset.

3.1.2 Pengaruh legal audit terhadap Optimalisasi asset tetap

Legal audit adalah manajemen asset yang berupa inventarisasi atas penguasaan asset, sistem dan prosedur penguasaan asset, identifikasi dan mencari permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan asset. Permasalahan yang sering ditemui adalah adanya asset yang dikuasai oleh pihak lain, adanya status penguasaan yang lemah, pemindahtanganan asset yang tidak termonitor. Berdasarkan undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, barang milik daerah yang berupa tanah yang dikuasai oleh pemerintah pusat/daerah seyogyanya disertifikatkan atas nama Pemerintah RI atau Pemerintah Daerah. legal audit merupakan tindakan pengendalian dan pengamanan, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum

Barang daerah dapat dipergunakan dengan optimal dengan melakukan penertiban pengamanan secara fisik dan administrasi. Pengamanan terhadap barang yang tidak bergerak dalam hal ini tanah dan bangunan dapat dilakukan dengan cara pemasangan plang tanda kepemilikan dan penjagaan, serta pemagaran.

3.1.3 Pengaruh penilaian terhadap tingkat optimalisasi asset tetap

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. Penetapan penilaian barang milik daerah berpedoman pada Standar Akutansi Pemerintahan (SAP). Penilaian barang milik daerah yang berupa tanah/bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah dan penilai yang diakui oleh pemerintah, dan biasanya penilaian barang milik daerah dilakukan oleh konsultan penilaian yang independen.

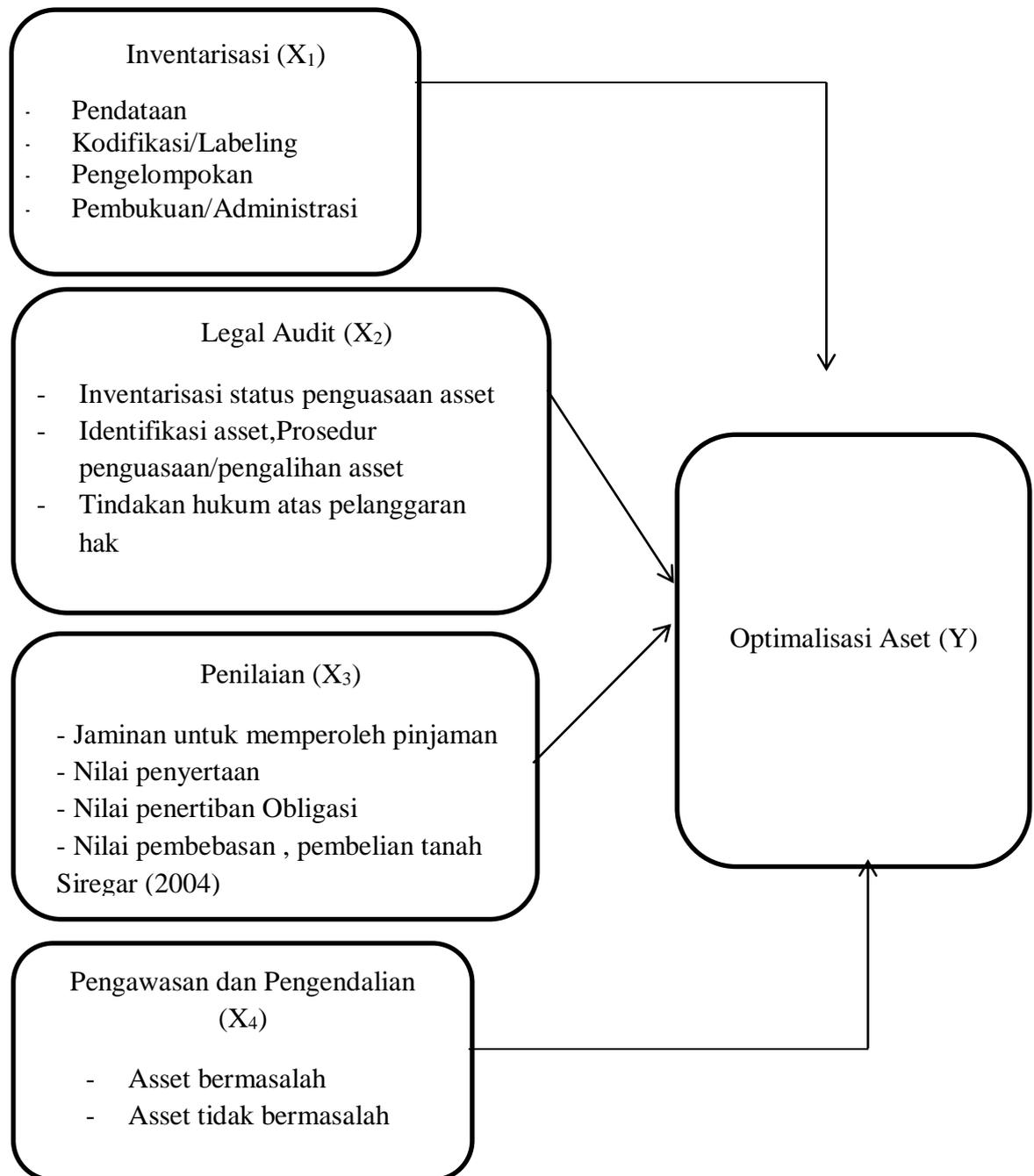
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang penilaian Barang Daerah, menyatakan bahwa obyek penilaian barang daerah meliputi seluruh barang yang dimiliki dan mempunyai nilai ekonomis.

3.1.4 pengaruh pengawasan dan pengendalian terhadap tingkat optimalisasi asset tetap.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, pengawasan dan pengendalian adalah pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangann, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada didalam penguasaan pemerintah daerah. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban, pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi.

Guna mengetahui pengaruh inventarisasi, legal audit, penilaian, pengawasan dan pengendalian terhadap tingkat optimalisasi asset pemerintah daerah kota Parepare, maka dibuatlah kerangka konseptual dimana Inventarisasi, legal audit, penilaian, pengawasan dan pengendalian merupakan sebagai variabel bebas (variabel independen), sedangkan Optimalisasi asset adalah variabel terikat (variabel dependen). Hubungan antara variabel-variabel yang dimaksud dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut :

Pengaruh Manajemen Asset terhadap Optimalisasi asset tetap Pemerintah Kota Parepare



Gambar 1
Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang merupakan harapan yang diinginkan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun hipotesis penelitian ini adalah :

1. diduga ada pengaruh positif antara inventarisasi asset terhadap tingkat optimalitas asset tetap (tanah dan bangunan) milik pemerintah Kota Parepare.
2. diduga ada pengaruh positif antara legal audit terhadap tingkat optimalitas asset tetap (tanah dan bangunan) milik pemerintah Kota Parepare.
3. diduga ada pengaruh positif antara penilaian terhadap tingkat optimalitas asset tetap (tanah dan bangunan) milik pemerintah kota Parepare.
4. diduga ada pengaruh positif antara pengawasan dan pengendalian terhadap tingkat optimalitas asset tetap (tanah dan bangunan) milik pemerintah Kota Parepare.

3.3 Defenisi Operasional Variabel

Variabel adalah karakteristik yang bisa diduplikasikan ke dalam sekurang-kurangnya dua klasifikasi atau indikator. Operasional variabel adalah untuk menjelaskan tentang pengertian operasionalisasi dari variabel-variabel yang dikembangkan dalam penelitian ini. Operasional variabel merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dalam

penelitian ini, variabel yang di teliti dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu variabel bebas (independen variabel) dan variabel terikat (dependen variabel).

Variabel Bebas (Independen variabel) terdiri dari :

1. Inventarisasi aset (X1) adalah metode pekerjaan fisik dan hukum yang berkaitan dengan pengolahan data, pengkodean / pelabelan, pengelompokan dan pembukuan / administrasi. Dalam pendataan misalnya mengenai bentuk, luas, volume / jumlah, jenis, alamat suatu aset, dalam hal ini aset tetap tanah dan bangunan. Indikator terdiri dari:
 - a. Aspek inventarisasi fisik asset yang dilihat dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis dan alamat
 - b. Aspek inventarisasi yuridis yaitu berupa status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan (pendataan, kodifikasi/ labeling, pengelompokan dan pembukuan/ administrasi.
2. Legal audit asset (X2) adalah proses kerja yang terkait dengan cara yang jelas mengenai status penguasaan asset tanah berupa sertifikat, penggunaan dan pengalihan asset. Dimana legal audit lebih terkait dengan tindakan hukum. Indikator terdiri dari :
 - a. Inventarisasi status penguasaan asset
 - b. Identifikasi asset, prosedur penguasaan/pengalihan asset
 - c. Tindakan hukum atas pelanggaran hak

3. Penilaian aset (X3) adalah cara kerja untuk menentukan barang milik pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Biasanya dilakukan oleh konsultan assesment independen (sertifikasi dengan mencantumkan nilai aset dalam rupiah). Untuk menentukan nilai aset dari suatu aset digunakan hasil evaluasi. Indikator terdiri dari:
 - a. Modal dasar milik daerah, jaminan untuk memperoleh pinjaman
 - b. Nilai penyertaan (saham) dalam melakukan suatu kerjasama usaha dengan pihak swasta, informasi nilai ekonomi property untuk mengundang investor, mengetahui nilai asset untuk kepentingan tukar guling.
 - c. Mengetahui nilai dalam rangka penerbitan obligasi daerah
 - d. Dasar nilai dalam pembebasan tanah, pembelian tanah.
4. Pengawasan dan Pengendalian Aset (X4) merupakan proses kerja yang dilakukan melalui pembuatan sistem informasi manajemen (SIMA). Karena pengawasan dan pengendalian sistem informasi manajemen akan meminimalisir kesalahan yang dilakukan dalam pemerintahan, seperti KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme). Indikator terdiri dari :
 - a. Asset bermasalah
 - b. Asset tidak bermasalah

Variabel terikat yaitu optimalisasi aset (Y) adalah pemanfaatan barang milik negara /daerah yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kementerian / lembaga / satuan kerja perangkat daerah dan / atau mengoptimalkan kekayaan negara / daerah tanpa mengubah status. kepemilikan. Indikator optimalisasi aset adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan data base
2. Pemanfaatan asset dengan nilai terbaik
3. Pengembangan strategi optimalisasi asset

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian survei yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat utama pengumpulan datanya (Singarimbun, 2013). Metode penelitian ini dimaksudkan sebagai model melalui pengujian hipotesis untuk menemukan dan menjelaskan hubungan kausal antar variabel. Survei dalam penelitian ini merupakan model yang digunakan oleh Pemerintah Kota Parepare untuk mengetahui pengaruh variabel inventaris, legal, audit, appraisal, dan manajemen aset serta optimalisasi aset terhadap optimalisasi aset.

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada pengurus barang dan pembantu pengurus barang pada lingkup Pemerintah (SKPD) Kota Parepare, waktu penelitian mulai bulan November 2019 sampai dengan Desember 2019..

4.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas atau totalitas objek yang diteliti, yang ciri-cirinya diukur atau diperkirakan. Karakteristik populasi disebut parameter. Populasi penelitian berupa individu (individu, organisasi, perkumpulan, atau komunitas) atau artefak, seperti jumlah publikasi di media massa, jumlah makalah di media massa, jumlah rubrik, dan lain sebagainya. (Saban Echdar, 2017). Populasi dalam

penelitian ini adalah pengurus barang dan pembantu pengelola barang yang tersebar di 33 SKPD yang terdiri dari 71 orang.

Sebagian dari populasi, yang terdiri dari banyak perwakilan populasi, adalah sampelnya (Saban Echdar, 2017). Subset tersebut diambil karena sulit bagi peneliti untuk mempelajari semua anggota populasi dalam hal tertentu, sehingga perlu dibuat populasi yang representatif. Sampel juga dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik populasi, atau sebagian kecil anggota populasi dapat juga disebut sebagai sampel, sesuai dengan prosedur tertentu yang mungkin mewakili populasi. Jika populasi yang diteliti besar maka sampel yang digunakan dan tidak mungkin peneliti mempelajari keseluruhan populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yang dibatasi pada jenis individu tertentu yang mampu memberikan dan menghargai informasi yang dibutuhkan. Setiap SKPD. Dalam analisis ini diambil sampel sebanyak 71 pegawai yang tersebar di sekitar SKPD Pemerintah Kota Parepare.

4.4 Jenis dan sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

1. Jenis data berdasarkan sifatnya
 - a. Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar seperti literature-literatur serta teori-teori yang berkaitan dengan penelitian penulis.
 - b. Data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk skala numeric atau angka seperti data yang diangkakan dari hasil kuesioner.

2. Jenis data berdasarkan sumbernya

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber analisis data yang dikumpulkan langsung dari (bukan oleh media proxy) sumber aslinya. Peneliti mengumpulkan data primer secara eksplisit untuk merespon penelitian, data primer dapat berupa pandangan subjek orang atau masyarakat, observasi objek, peristiwa atau kegiatan, dan hasil tes (Saban Echdar 2017). Informasi primer yang dikumpulkan adalah data kualitatif yang bersumber dari kuisisioner pengelola barang dan asisten pengelola barang di masing-masing SKPD Pemerintah Kota Parepare.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara data sekunder berupa bukti, dokumen atau laporan sejarah yang disusun dalam arsip yang diterbitkan dan tidak dipublikasikan pada umumnya. Data sekunder dari lembaga / organisasi atau pihak yang terafiliasi dengan laporan ini, yaitu data dari sektor aset Dinas Keuangan Daerah Kota Parepare, dikumpulkan dalam penelitian ini.

4.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan, yaitu data dikumpulkan melalui kuesioner dengan cara menyampaikan daftar pertanyaan yang telah tersusun rapi, terstruktur, dan tertulis kepada responden untuk diisi

sesuai pendapat pribadinya atas masalah yang diteliti kemudian digunakan. Dalam penelitian ini adalah kuesioner yang digunakan dalam penelitian Jusmin (2013). Pendistribusian kuisisioner secara operasional dilakukan dengan cara menyebarkan kepada pegawai yang bekerja di seluruh SKPD Pemerintah Kota Parepare dan sesuai dengan kriteria.

4.6 Instrumen Penelitian

4.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Untuk mengukur akurat tidaknya suatu kuesioner digunakan uji validitas. Suatu kuesioner dikatakan akurat jika memungkinkan pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner menunjukkan sesuatu yang akan diuji kuesioner tersebut. Validitas ingin menilai apakah pertanyaan yang kita ajukan dalam kuesioner benar-benar dapat mengukur apa yang ingin kita ukur (Ghozali, 2016). Uji validitas yang digunakan adalah korelasi individu. Dalam analisis ini signifikansi korelasi Pearson yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka item query valid dan pertanyaan tidak valid jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2016).

2. Uji Reliabilitas

Merupakan instrumen evaluasi angket yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Jika respon seseorang terhadap suatu proposisi konsisten atau konstan dari waktu ke waktu, Ghozali (2016), suatu kuesioner dikatakan akurat atau reliabel.

Dalam analisis ini, cara untuk menilai reliabilitas angket adalah dengan menghitung reliabilitas uji statistik Cronbach Alpha. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Nunnally, 1994) diberikan, variabel tersebut dikatakan akurat.

4.6.2 Uji asumsi klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel perancu atau residual memiliki distribusi normal dalam model regresi. Uji t dan F diketahui mengasumsikan nilai sisa mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual biasanya terdistribusi atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan pengujian statistik (Ghozali, 2016). Uji yang digunakan dalam analisis ini adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirno. Model regresi mengikuti asumsi normalitas jika data yang diukur menghasilkan nilai di atas 0,05. Sebaliknya, model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas jika data yang diukur menghasilkan nilai di bawah 0,05.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah hubungan (netral) antar variabel independen dihitung dengan model regresi. Seharusnya tidak ada hubungan antara variabel independen dalam model regresi yang berhasil. Variabel-variabel ini tidak ortogonal jika variabel independen dikaitkan. Faktor ortogonal merupakan faktor independen dengan signifikansi nol hubungan antara faktor independen (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, dilihat dari nilai toleransi dan kebalikan dari variance inflation

factor (VIF) dapat dilihat adanya multikolinearitas. Nilai toleransi <0.10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$ merupakan nilai cutoff yang banyak digunakan untuk mengisyaratkan multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedastisitas mencoba untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu observasi ke observasi lainnya dalam model regresi. Jika varian sisa konstan dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya, itu disebut homoskedastisitas, dan itu disebut heteroskedastisitas jika berbeda. Model regresi yang berhasil adalah model heteroskedastik yang homoscedastic atau tidak terjadi (Ghozali, 2016).

Dalam penelitian ini, cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan residualnya. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara keduanya dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di studentized Dasar analisis (Ghozali, 2013):

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

4.7 Skala Pengukuran Variabel

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert sebagai metode untuk mengukur sikap, pendapat dan harapan seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial Sugiyono (2013). Analisis ini ditentukan secara jelas oleh peneliti yang selanjutnya disebut variabel penelitian.

Variabel yang akan dihitung diubah menjadi ukuran variabel pada skala likert. Kemudian, sebagai titik awal penyusunan item instrumen yang bisa berupa statement atau queri, digunakan indikator-indikator ini.

Respon setiap item instrumen yang menggunakan skala likert memiliki gradien yang dapat berupa istilah-istilah dari sangat positif sampai sangat negatif.

Item instrument yang digunakan adalah sebagai berikut:

SS	=	sangat setuju	=	5
S	=	setuju diberi skor	=	4
N	=	netral diberi skor	=	3
TS	=	tidak setuju diberi skor	=	2
STS	=	sangat tidak setuju	=	1

Teknik perhitungan sebagai berikut:

1. Jumlah responden yang memilih suatu item dikalikan skor item yang dipilih

2. Hasil perkalian dijumlahkan
3. Hasil penjumlahan tersebut yang menentukan posisi item

Semakin tinggi hasil penjumlahan akan menggambarkan pelaksanaan manajemen asset semakin baik, maka rumus untuk memperoleh prosentase manajemen asset berdasarkan item-item pernyataan adalah

$$\text{Tingkat persepsi responden} = \frac{\text{Skor yang didapat}}{\text{Skor tertinggi}} \times 100$$

Dari penjumlahan skor tersebut, dapat ditentukan kriteria pelaksanaan manajemen asset dengan menggunakan skala yang ditentukan :

Angka 0 persen – 20 persen = sangat kurang

Angka 21 persen – 40 persen = kurang

Angka 41 persen - 60 persen = sedang

Angka 61 persen – 80 persen = baik

Angka 81 persen – 100 persen = sangat baik

Tujuan daripada penggunaan skala likert adalah untuk menganalisis apakah pelaksanaan manajemen asset sesuai dengan kaidah yang berlaku, meliputi inventarisasi asset, legal audit, penilaian asset, serta pengawasan dan pengendalian asset.

4.8 Teknik Analisis Data

4.8.1 Analisis Regresi Berganda

Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Metode penelitian ini digunakan karena lebih dari satu variabel

independen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y	=	Optimalisasi asset tetap
a	=	Konstanta
$b_{1,2,3,4}$	=	Koefisien regresi
X_1	=	inventarisasi asset
X_2	=	legal audit asset
X_3	=	penilaian asset
X_4	=	pengawasan dan pengendalian asset
e	=	error

4.8.2 Unstandarrdized Beta Coefficients

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi menurut Ghozali (2016) bertujuan untuk menghitung sejauh mana kemampuan model menjelaskan perbedaan variabel dependen. Antara nol dan satu adalah koefisien determinasi. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa variabel-variabel independen sangat terkendala kemampuannya dalam mendeskripsikan variabel dependen. Klasifikasi koefisien korelasi tanpa memperhatikan arah adalah sebagai berikut:

1. 0 : Tidak ada Korelasi
2. 0 s.d 0,49 : Korelasi lemah
3. 0,50 : Korelasi moderat
4. 0,51 s.d 0,99 : Korelasi kuat
5. 1.00 : Korelasi sempurna

Kekurangan dari koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel yang termasuk dalam model yang independen. R² pasti akan meningkat setiap kali variabel independen dimasukkan, terlepas dari apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel dependen. Model R² yang dimodifikasi kemudian digunakan, yang jika variabel independen diterapkan pada model tersebut dapat meningkat atau menurun (Ghozali, 2016).

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F menguji efisiensi kesesuaian, yaitu keakuratan fungsi regresi sampel, ketika nilai akurat diperkirakan. Jika nilai signifikansi F < 0,05 maka variabel independen dapat diestimasi dengan menggunakan model regresi. Uji statistik F juga menunjukkan apakah variabel dependen memiliki pengaruh bersama terhadap semua variabel independen atau bebas yang termasuk dalam model (Ghozali, 2016).

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t mempunyai nilai signifikansi $\alpha=5\%$. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistic t adalah signifikansi $t(p\text{-value}) < 0,05$, maka hipotesis alternative diterima. Yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, walikota selaku kepala daerah. Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah dan 33 Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan pemerintahan.

SKPD terkait bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan aset / barang milik daerah yang diawasinya, dimana terdapat pengelola dan asisten pengelola barang dalam pengelolaan aset / barang milik daerah yang diberi tugas mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan dan mengelola properti daerah. Kota Parepare beranggotakan 71 orang pengurus dan pembantu pengurus barang yang diterbitkan oleh Walikota Parepare yang disalurkan lebih dari 33 SKPD.

Pengelolaan asset secara optimal sangat berpengaruh terhadap pelaporan keuangan daerah terutama pencapaian Opini WTP atas laporan keuangan daerah. Salah satu permasalahan pemerintah daerah tidak mendapatkan Opini WTP adalah pengelolaan Asset/barang milik daerah yang tidak optimal diantaranya:

1. Asset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya
2. Asset daerah masih banyak dikuasai oleh pihak yang tidak berhak
3. Asset belum jelas kepemilikannya

4. dll

5.1.2 Pengujian Instrumen

1. Uji Validitas

Untuk mengukur akurat tidaknya suatu kuesioner digunakan uji validitas. Suatu kuesioner dikatakan akurat jika memungkinkan pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner menunjukkan sesuatu yang akan diuji kuesioner tersebut. Validitas perlu menguji apakah pertanyaan yang kita ajukan dalam kuesioner benar-benar akan mengukur apa yang ingin kita ukur (Ghozali, 2016). Korelasi product moment dari Pearson adalah uji validitas yang digunakan. Dalam analisis ini signifikansi korelasi Pearson yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka item query valid dan pertanyaan tidak valid jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2016). Kondisi pengujian yang digunakan pada instrumen akurat dengan menggunakan koefisien korelasi product moment jika nilai $r > 0,235$ (R Tabel). Adapun hasil uji validitas dari setiap item penelitian ini masing-masing dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Variabel Inventarisasi (X1)

Item	Corrected Item-Total Correlation (r Hitung)	r Tabel	Status
X1 1	0,599	0,235	Valid
X1 2	0,574	0,235	Valid
X1 3	0,523	0,235	Valid
X1 4	0,532	0,235	Valid
X1 5	0,546	0,235	Valid

Sumber: *Data Primer, diolah 2019*

Angka korelasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil uji validitas di atas yang ternyata lebih besar dari R tabel yang tersirat sebesar 0,235. Nilai korelasi kumulatif (r hitung) dari elemen persediaan (X1) dari item yang dikoreksi adalah 0,523-0,599. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai r hitung > 0,235 menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada Inventory Questionnaire (X1) valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Variabel Legal Audit (X2)

Item	Corrected Item-Total Correlation (r Hitung)	r Tabel	Status
X2 1	,505	0,235	Valid
X2 2	,522	0,235	Valid
X2 3	,453	0,235	Valid
X2 4	,541	0,235	Valid
X2 5	,528	0,235	Valid

Sumber: *Data Primer, diolah 2019*

Angka korelasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil uji validitas di atas yang sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan r tabel yang dipersyaratkan sebesar 0,235. Nilai total korelasi variabel Audit Hukum (X2) dari item yang dikoreksi adalah antara 0,453-528. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung > 0,235 (r tabel) menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner audit hukum (X2) valid atau ada yang dapat diungkapkan. Itu akan dihitung dengan kuisisioner, sehingga untuk studi selanjutnya bisa digunakan.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel Penilaian (X3)

Item	Corrected Item-Total Correlation (r Hitung)	r Tabel	Status
X3 1	0,482	0,235	Valid
X3 1	0,549	0,235	Valid
X3 1	0,637	0,235	Valid
X3 1	0,643	0,235	Valid
X3 1	0,574	0,235	Valid

Sumber: *Data Primer, diolah 2019*

Angka korelasi tersebut didapat berdasarkan hasil uji validitas diatas yang ternyata lebih besar dari R tabel yang disimpulkan sebesar 0,235. Untuk komponen penilaian (X3) nilai Korelasi Kumulatif Butir Koreksi sebesar 0.482-0.643. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai r hitung > 0,235 mengandung arti bahwa item pernyataan pada angket evaluasi (X3) adalah benar atau mampu mengungkapkan sesuatu yang dapat diuji oleh angket sehingga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan (X4)

Item	Corrected Item-Total Correlation (r Hitung)	r Tabel	Status
X4 1	0,658	0,235	Valid
X4 1	0,765	0,235	Valid
X4 1	0,530	0,235	Valid
X4 1	0,590	0,235	Valid

Sumber: *Data Primer, diolah 2019*

Angka korelasi didapatkan berdasarkan hasil uji validitas di atas yang ternyata lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,235. Nilai saat ini dari objek koreksi total antara 0,530-0,765 untuk variabel kontrol. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai r hitung $>$ 0,235 (R tabel) menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada kuesioner surveilans (X4) valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur kuesioner tersebut sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel Optimalisasi Aset (Y)

Item	Corrected Item-Total Correlation (r Hitung)	r Tabel	Status
Y 1	0,623	0,235	Valid
Y 2	0,573	0,235	Valid
Y 3	0,574	0,235	Valid
Y 4	0,501	0,235	Valid
Y 5	0,549	0,235	Valid
Y 6	0,620	0,235	Valid
Y 7	0,520	0,235	Valid

Sumber: *Data Primer, diolah 2019*

Angka korelasi diperoleh berdasarkan hasil uji validitas yang ditunjukkan pada tabel di atas (Tabel 5), yang ternyata lebih besar dari R tabel yang tersirat pada 0,235. Nilai korelasi kumulatif dari item yang dikoreksi untuk vektor pengoptimalan aset (Y) adalah 0,501-0,623. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai r hitung $>$ 0,235 R tabel mengandung arti bahwa semua item pernyataan pada kuesioner tentang optimasi aset (Y) adalah benar atau dapat mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur kuesioner tersebut sehingga dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu metode yang menjadi indikator suatu komponen atau konstruk untuk mengevaluasi suatu kuesioner. Jika respon seseorang terhadap suatu proposisi konsisten atau konstan dari waktu ke waktu, Ghozali (2016), suatu kuesioner dikatakan akurat atau reliabel. Data yang dapat diandalkan (relatif sama) bila digunakan dua kali pada benda yang sama oleh alat ukur. Dengan bantuan program SPSS 21.0 for windows diperoleh hasil bahwa semua pernyataan reliable karena memiliki cronbach alpha lebih besar dari 0,70 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Cut Of Point	Status
Inventarisasi (X1)	0,778	0,70	Reliabel
Legal Audit (X2)	0,741	0,70	Reliabel
Penilaian (X3)	0,790	0,70	Reliabel
Pengawasan dan Pengendalian (X4)	0,806	0,70	Reliabel
Optimalisasi Asset (Y)	0,815	0,70	Reliabel

Sumber: *Data Primer, diolah 2019*

Berdasarkan tabel pengujian reliabilitas di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien reliabilitas untuk komponen Persediaan (X1) sebesar $0,778 > 0,70$. Variabel audit hukum (X2) sebesar $0,741 > 0,70$, variabel penilaian (X3) $0,790 >$

0,70, variabel pengawasan dan kontrol 0,806 > 0,70, dan variabel optimasi aset (Y) 0,815 > 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa karena Cronbach Alpha lebih besar dari Cut of Point maka variabel diatas diterima.

5.1.3 Skala Likert (hasil persepsi responden)

Skala likert merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai pandangan, sikap, dan keyakinan seseorang atau sekelompok individu tentang fenomena sosial. Berdasarkan kuesioner yang dikembalikan, 71 responden memiliki skor tertinggi 6.745 (5 x 19 x 71) untuk semua pernyataan dan 1.349 (1 x 19 x 71) sebagai skor keseluruhan terendah. Jawaban yang telah diberikan oleh responden dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7
Rekapitulasi Jawaban Responden

Variabel	Skala Likert					Total
	STS	TS	N	S	SS	
	1	2	3	4	5	
Inventarisasi	0	1	17	229	108	355
Legal Audit	0	1	30	233	91	355
Penilaian	0	0	26	241	88	355
Pengawasan & Pengendalian	0	0	42	175	67	284
Jumlah	0	1	115	878	354	1349
Total (Skor x Jumlah)	0	4	345	3512	1770	5630
%	0.000	0.071	6.127	62.369	31.433	100

Sumber: *Data primer, diolah 2019*

Berdasarkan gambaran karakteristik responden pada tabel 7 menunjukkan adanya keragaman. Hal tersebut menunjukkan berbagai karakter responden terjaring dan memungkinkan bervariasinya tanggapan dan pernyataan terhadap variabel-variabel penelitian.

Tabel 7 menunjukkan frekuensi pilihan jawaban tertinggi dari responden adalah pilihan jawaban empat atau setuju sebesar 3.512 (62,38%), kemudian diikuti pilihan jawaban lima atau sangat setuju sebesar 1.770 (31,43%), selanjutnya pilihan jawaban tiga atau netral adalah sebesar 345 (6,12%), pilihan jawaban dua atau tidak setuju adalah sebesar 2(0,071%), dan terakhir pilihan jawaban satu atau sangat tidak setuju adalah 0 (0,00%).

Selanjutnya menghitung presentase pelaksanaan optimalisasi asset berdasarkan item-item yang di ukur dari tingkat persepsi responden terhadap faktor-faktor manajemen asset. Kriteria skala pelaksanaan adalah sebagai berikut :

Angka 0 persen – 20 persen = sangat kurang

Angka 21 persen – 40 persen = kurang

Angka 41 persen - 60 persen = sedang

Angka 61 persen – 80 persen = baik

Angka 81 persen – 100 persen = sangat baik

Hasil perhitungan prosentase tingkat persepsi responden adalah sebesar 83,48 persen ($5.631/6745 \times 100$). Dimana angka ini jika di plot pada skala pelaksanaan, maka terletak pada rentang 81 – 100% persen artinya pelaksanaan optimalisasi asset tetap milik pemerintah Kota Parepare sudah sangat baik.

5.1.4 Deskripsi Responden

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 71 orang pegawai pada lingkup Pemerintah Kota Parepare yang terdiri dari Pengurus Barang dan pembantu pengurus barang, yang memiliki karakteristik, jenis kelamin dan jenjang pendidikan yang berbeda. Adapun distribusi responden berdasarkan karakteristik tersebut adalah :

1. Jenis kelamin

Tabel 8
Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
laki-laki	52	73,2
Perempuan	19	26,8
Total	71	100,0

Sumber : *Data primer, diolah 2019*

Berdasarkan Tabel 8 yang menunjukkan deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, responden terdiri dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Dari hasil kuesioner yang disebarkan jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan responden perempuan. Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 orang dengan tingkat prosentase 73,2 % dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 19 orang dengan tingkat prosentase 26,8 orang.

2. Jenjang Pendidikan

Tabel 9
Distribusi Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Sma	11	15,5
Diploma	1	1,4
D3	6	8,5
S1	30	42,3
S2	5	7,0
Total	53	74,6
Missing System	18	25,4
Total	71	100,0

Sumber : *Data Primer, diolah 2019*

Terdapat 4 (empat) tingkat pendidikan responden berdasarkan tabel 9 yang menampilkan definisi responden berdasarkan tingkat pendidikan, hasil pengukuran diperoleh 11 responden dengan riwayat sekolah menengah atas dengan persentase tingkat 15,5 persen. Responden dengan latar belakang Diploma 1 sebanyak 1 (satu) orang dengan persentase sebesar 1,4%. 6 (enam) orang dengan tingkat persentase 8,5 persen merupakan responden dengan riwayat D3. 30 (tiga puluh) orang dengan persentase tingkat 42,3 persen merupakan responden dengan latar belakang pendidikan sarjana. Dan pada akhirnya 5 (lima) orang

dengan persentase tingkat 7,0% merupakan responden yang memiliki riwayat pendidikan magister.

5.1.5 Deskripsi Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan pada 33 SKPD Pemerintah Kota Parepare, maka dapat diperoleh informasi yang kongkrit tentang pengaruh manajemen asset terhadap tingkat optimalisasi asset Pemerintah Kota Parepare dimana terdapat variabel-variabel pernyataan yang disebarkan yang terdiri dari Variabel Inventarisasi, variabel legal audit, Variabel Penilaian, dan Variabel Pengawasan dan pengendalian.

1. Inventarisasi (X1)

Gambaran distribusi frekuensi inventarisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10

Distribusi Frekuensi Variabel Inventarisasi

No	Pernyataan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Proses inventarisasi /pendapatan asset tetap (tanah dan bangunan pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	0	0	0	0	1	1.4	46	64.7	24	33.8

No	Pernyataan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
2	Kegiatan inventarisasi asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan labeling menurut jenisnya.	0	0	1	1.4	5	7.0	48	67.6	17	23.9
3	Inventarisasi asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD pemerintah Kota Parepare sudah mengelompokkan menurut jenis barangnya.	0	0	0	0	7	9.8	44	61.9	20	28.1
4	Asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan.	0	0	0	0	2	2.8	44	61.9	25	35.2
5	Proses Inventarisasi asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare yang telah dilaksanakan saat ini dapat meningkatkan optimalitas dan pemanfaatan dari asset tersebut.	0	0	0	0	2	2.8	47	66.2	22	30.9

Sumber : *Data Primer, diolah 2019*

Berdasarkan tabel 10, untuk pernyataan pertama terdapat 38,8 % responden yang menyatakan sangat setuju, 64,8 % responden yang menyatakan setuju, 1,41 yang menyatakan Netral dan 0 % yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju, sehingga untuk pernyataan pertama pada variabel inventarisasi untuk pernyataan Proses inventarisasi/pendapatan asset tetap (tanah dan bangunan pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku rata-rata setuju.

Pernyataan kedua terdapat 23,9 % responden yang menyatakan Sangat setuju, 67,6% responden yang menyatakan Setuju, 7,4% responden yang menyatakan Netral, 1% responden yang menyatakan Tidak setuju dan 0% yang menyatakan sangat tidak setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel inventarisasi untuk pernyataan Kegiatan inventarisasi asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan labeling menurut jenisnya rata-rata setuju.

Pernyataan ketiga terdapat 28,2% responden menyatakan sangat setuju, 62% menyatakan setuju, 9,86% netral, dan 0% yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju, sehingga variabel inventarisasi untuk pernyataan Inventarisasi asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD pemerintah Kota Parepare sudah mengelompokkan menurut jenis barangnya rata-rata setuju.

Pernyataan keempat terdapat 35,2% responden yang menyatakan sangat setuju, 62% responden yang menyatakan setuju, 2% responden yang menyatakan netral dan 0% yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju, sehingga

variabel inventarisasi untuk pernyataan Asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan rata-rata setuju.

Pernyataan kelima terdapat 31% responden yang menyatakan sangat setuju, 66,2 % menyatakan setuju, 2% responden yang menyatakan netral dan 0% yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju, sehingga variabel inventarisasi untuk pernyataan Proses Inventarisasi asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare yang telah dilaksanakan saat ini dapat meningkatkan optimalitas dan pemanfaatan dari asset tersebut rata-rata setuju.

2. Legal Audit

Distribusi variabel legal audit dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 11
Distribusi frekuensi variabel legal audit

No	Pernyataan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Proses Legal audit (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	0	0	0	0	3	4.2	54	76.0	14	19.7

No	Pernyataan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
2	Kegiatan legal audit asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD pemerintah kota Parepare sudah dilakukan oleh suatu badan/unit kerja yang khusus menangani masalah legal audit asset.	0	0	1	1.4	6	8.4	44	61.9	20	28.1
3	SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah melakukan kegiatan pengurusan sertifikasi kepemilikan aaset tanah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kehilangan asset yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi Pemerintah Kota Parepare.	0	0	0	0	11	15.4	40	56.3	20	28.1
4	SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah melakukan pengaturan yang jelas mengenai penguasaan, penggunaan dan pengalihan asset tetap (tanah dan bangunan).	0	0	0	0	6	8.4	48	67.6	17	23.9

No	Pernyataan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
5	Proses legal audit asset tetap (tanah dan bangunan) SKPD Pemerintah Kota Parepare yang telah dilaksanakan saat ini dapat mempengaruhi peningkatan optimalitas dari nilai asset tersebut.	0	0	0	0	4	5.6	47	66.	20	28.1

Sumber: *Data Primer, diolah 2019*

Berdasarkan tabel 11, pernyataan pertama variabel legal audit terdapat 19,7 % responden yang menyatakan sangat setuju, 76,1 responden yang menyatakan setuju, 4, 23 % responden yang menyatakan netral, dan 0% responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sehingga variabel legal audit untuk pernyataan Proses Legal audit (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku rata-rata responden menyatakan setuju.

Pernyataan kedua variabel legal audit terdapat 28,2% responden yang menyatakan sangat setuju, 62% responden yang menyatakan setuju, 8,45% responden yang menyatakan netral, 1 % responden yang menyatakan tidak setuju dan 0 % yang menyatakan sangat tidak setuju. Sehingga variabel legal audit untuk pernyataan Kegiatan legal audit asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD

pemerintah kota Parepare sudah dilakukan oleh suatu badan/unit kerja yang khusus menangani masalah legal audit asset rata-rata responden setuju.

Pernyataan ketiga variabel legal audit terdapat 28,2 % responden yang menyatakan sangat setuju, 56,3% responden yang menyatakan setuju, 1,5 % responden yang menyatakan netral dan 0% responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sehingga variabel legal audit untuk pernyataan SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah melakukan pengaturan yang jelas mengenai penguasaan, penggunaan dan pengalihan asset tetap (tanah dan bangunan) rata-rata responden setuju.

Pernyataan keempat variabel legal audit terdapat 23,9 % responden yang menyatakan sangat setuju, 67,6 % responden yang menyatakan setuju, 8,45 % yang menyatakan netral dan 0 % yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sehingga variabel legal audit untuk pernyataan SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah melakukan pengaturan yang jelas mengenai penguasaan, penggunaan dan pengalihan asset tetap (tanah dan bangunan), rata-rata setuju.

3. Variabel Penilaian

Distribusi frekuensi variabel penilaian dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 12
Distribusi frekuensi Variabel Penilaian

No	Pernyataan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Proses penilaian asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	0	0	0	0	0	0	51	71.8	20	28.17
2	SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah melakukan proses penilaian yang dilakuakn oleh suatu lembaga penilai yang independen sesuai dengan amanat undang-undang.	0	0	0	0	12	16.9	42	59.1	17	23.9
3	Kegiatan penilaian terhadap asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan agar diketahui secara pasti informasi nilai kekayaan yang terkandung di dalam asset tersebut.	0	0	0	0	8	11.2	46	64.7	17	23.9

No	Pernyataan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
4	SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah melakukan proses penilaian terhadap asset tetap (tanah dan bangunan) dengan mencantumkan nilai asset dalam rupiah.	0	0	0	0	4	5.6	56	78.8	11	15.4
5	Proses penilaian terhadap asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare jika dilaksanakan dengan baik, maka akan dapat mempengaruhi peningkatan optimalitas dari nilai asset tersebut.	0	0	0	0	2	2.8	46	64.7	23	32.3

Sumber: *Data primer, diolah 2019*

4. Pengawasan dan Pengendalian

Distribusi pengawasan dan pengendalian dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 13
Distribusi Frekuensi Pengawasan dan Pengendalian

No	Pernyataan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Proses pengawasan asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	0	0	0	0	4	5.6	52	73.2	15	21.1
2	Kegiatan pengawasan dan pengendalian asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan oleh suatu badan/unit kerja yang khusus mengenai masalah pengawasan dan pengendalian asset.	0	0	0	0	14	19.7	41	57.7	16	22.5

No	Pernyataan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
3	Kinerja pengawasan dan pengendalian asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah ditingkatkan melalui pengembangan sistem informasi manajemen asset (SIMA).	0	0	0	0	20	28.1	36	50.7	15	21.1
4	Proses pengawasan dan pengendalian terhadap asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD pemerintah daerah jika dilaksanakan dengan baik, maka akan dapat mempengaruhi peningkatan optimalitas dari nilai asset tersebut.	0	0	0	0	4	5.6	46	64.7	21	29.5

Sumber: *Data primer, diolah 2019*

5. Optimalisasi Asset

Distribusi optimalisasi asset dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 14
Distribusi frekuensi Optimalisasi asset

No	Pernyataan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	SKPD Pmerintah Kota Parepare telah merencanakan kebutuhan asset tetap (tanah dan bangunan) dan pemeliharaan yang telah dituangkan dalam RKA, kemudian diserahkan pada Bidang Asset.	0	0	0	0	5	7.0	51	71.8	15	21.1
2	SKPD Pemerintah Kota Parepare merencanakan kebutuhan asset tetap (tanah dan bangunan) dengan memperhatikan kondisi barang yang ada dan jumlah pegawai.	0	0	0	0	4	5.6	55	77.4	12	16.9
3	Bidang asset meneliti dan menghimpun daftar kebutuhan asset tetap (tanah dan bangunan) milik daerah untuk satu tahun anggaran.	0	0	1	1.4	15	21.1	40	56.3	15	21.1

No	Pernyataan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
4	Pengadaan dan pemeliharaan asset tetap (tanah dan bangunan) pada Pemerintah Kota Parepare berpedoman pada daftar kebutuhan barang.	0	0	0	0	10	14.0	45	63.3	16	22.5
5	SKPD Pemerintah Kota Parepare dalam melakukan proses pengelolaan asset tetap (tanah dan bangunan) memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.	0	0	0	0	5	7.0	53	74.6	12	16.9
6	Bidang asset menerbitkan surat keputusan penetapan penghapusan asset tetap (tanah dan bangunan) berdasarkan usulan SKPD.	0	0	0	0	0	0	55	77.4	15	21.1
7	Bidang asset melakukan pengamanan terhadap asset tetap (tanah dan bangunan) baik secara administrative, fisik, maupun hukum agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.	0	0	0	0	3	4.2	40	56.3	28	39.4

Sumber: *Data primer, diolah 2019*

5.1.6 Hasil Regresi

1. Analisa Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh inventarisasi, legal audit, penilaian, pengawasan dan pengendalian terhadap optimalisasi asset. Berdasarkan pengolahan data bantuan SPSS 21.0, maka berikut ini output hasil regresi berganda adalah :

Tabel 15
Output Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,706	2,152		2,187	0,032
inventarisasi	0,350	,146	,267	2,398	0,019
legal audit	-0,042	,172	-,032	-,245	0,807
penilaian	0,554	,166	,419	3,331	0,001
1 Pengawasan	0,376	,141	,278	2,665	0,010
R2	0,679				
F Hitung	34,854				
Sig (f)	0,000				

a. Dependent Variable: optimalisasi asset

Sumber: *Data Primer, diolah 2019*

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diperoleh hasil analisis yaitu Pengujian model regresi hasil olah statistik adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 4,706 + 0,350 - 0,042 + 0,554 + 0,376$$

Situasi ini menunjukkan bahwa variabel inventaris, evaluasi dan pemantauan memiliki arah yang positif menuju optimalisasi properti. Sedangkan

komponen legal audit berpengaruh negatif terhadap optimalisasi aset. Hal ini menunjukkan bahwa inventarisasi, legal audit, appraisal, monitoring dan control semakin berkembang, sehingga optimalisasi aset di Pemerintah Kota Parepare akan meningkat dan belum berjalan dengan baik untuk legal audit.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi menurut Ghozali (2016) bertujuan untuk menghitung sejauh mana kemampuan model menjelaskan perbedaan variabel dependen. Antara nol dan satu adalah koefisien determinasi. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa variabel-variabel independen sangat terkendala kemampuannya dalam mendeskripsikan variabel dependen. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti bahwa hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen diberikan oleh variabel independen.

Hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) pada pengurus barang pada lingkup pemerintah kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,824 ^a	,679	,659	1,52216

a. Predictors: (Constant), pengawasan, legal audit, inventarisasi, penilaian

Sumber : *Data Primer, diolah 2019*

Hubungan antara persediaan, legal audit, appraisal, pengawasan dan pengendalian optimalisasi aset secara bersama-sama atau secara simultan dapat

dilihat dari harga korelasi simultan R, berdasarkan tabel di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang kuat pada optimalisasi aset inventaris, audit hukum dan variabel penilaian secara bersama-sama termasuk dalam kelompok yang sangat kuat. Variasi optimalisasi aset dipengaruhi oleh persediaan 0,679 atau 67,9 persen, legal audit, appraisal, monitoring dan control dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini.

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Dalam mengestimasi nilai yang akurat, uji statistik F menguji goodness or fit yaitu keakuratan fungsi regresi sampel. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka variabel independen dapat diestimasi dengan menggunakan model regresi. Uji statistik F juga menunjukkan apakah variabel dependen memiliki pengaruh timbal balik terhadap semua variabel independen atau bebas yang termasuk dalam model (Ghozali, 2016).

Hasil perhitungan uji signifikansi simultan (uji statistik f) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	323,024	4	80,756	34,854	,000 ^b
	Residual	152,919	66	2,317		
	Total	475,944	70			

a. Dependent Variable: optimalisasi asset

b. Predictors: (Constant), pengawasan, legal audit, inventarisasi, penilaian

Sumber: *Data Primer, diolah 2019.*

Untuk melihat F tabel dalam pengujian hipotesis pada model regresi, perlu menentukan derajat bebas atau degree of freedom (df) atau dikenal dengan df2 dan juga dalam f tabel disimbolkan dengan N2. Hal ini dapat ditentukan dengan rumus:

$$Df1 = k-1$$

$$Df2 = n-k$$

Ket:

- n = Jumlah Observasi / Responden
- k = Jumlah Variabel

Dalam penelitian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 5% atau 0,05 dalam hal ini $df1 = 5-1 = 4$ dan $df2 = 71-5 = 66$, maka nilai F tabel adalah 2,51.

Berdasarkan hasil uji statistik F dapat dilihat dimana nilai f hitung lebih besar daripada nilai F tabel yaitu $34,854 > 2,51$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Inventarisasi, Legal audit, Penilaian dan pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi pengelolaan asset Pemerintah Kota Parepare, diterima.

4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pada dasarnya uji statistik t menunjukkan sejauh mana pengaruh satu variabel penjelas (independen) dalam mendeskripsikan perbedaan variabel dependen secara individual. Nilai makna dari uji t adalah $\alpha = 5$ persen. Signifikansi t (p-value) $< 0,05$ merupakan kriteria evaluasi hipotesis dengan menggunakan uji statistik t, kemudian hipotesis alternatif diterima. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel dependen dipengaruhi secara independen dan substansial oleh variabel independen (Ghozali, 2016).

Adapun hasil uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) pengurus barang pada pemerintah kota parepare dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 18
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,706	2,152		2,187	,032
1 inventarisasi	,350	,146	,267	2,398	,019
legal audit	-,042	,172	-,032	-,245	,807
penilaian	,554	,166	,419	3,331	,001
pengawasan	,376	,141	,278	2,665	,010

a. Dependent Variable: optimalisasi asset

Sumber: *Data Primer, diolah 2019*

Untuk melihat t tabel dalam pengujian hipotesis pada model regresi, perlu menentukan derajat bebas atau degree of freedom dan hal ini ditentukan dengan rumus :

$$DF = n - k$$

n = Banyaknya jumlah observasi/responden

k = Banyaknya variabel

Pada analisis regresi digunakan probabilitas dengan mencari nilai tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\% = 0,05$ dengan derajat kebebasan (df) n-k atau

$71-5 = 66$ (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel). Dengan pengujian 1 sisi (signifikansi = 0,05) hasil diperoleh untuk t tabel adalah sebesar 1,668 sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian statistik t pada tabel diatas, membuktikan bahwa hasil uji regresi diatas untuk variabel Identifikasi (X_1) terhadap Optimalisasi asset (Y) memiliki t hitung lebih besar daripada nilai t tabel yaitu sebesar $2,398 > 1,668$ dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05, yaitu $0,019 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Identifikasi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Asset dan hipotesis pada penelitian ini diterima.
2. Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial t pada tabel diatas membuktikan bahwa hasil uji regresi untuk variabel Legal audit memiliki t hitung yang lebih kecil dari pada t tabel yaitu sebesar $-0,245 < 1,668$ dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05 yaitu $0,807 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Legal audit secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi asset dan hipotesis pada penelitian ini di tolak.
3. Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial t pada tabel di atas membuktikan bahwa hasil uji regresi untuk variabel penilaian memiliki t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu sebesar $3,331 > 1,668$ dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,001 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Penilaian secara parsial mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi asset dan hipotesis pada penelitian ini di terima.

4. Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial t pada tabel di atas membuktikan bahwa hasil uji regresi untuk variabel pengawasan dan pengendalian memiliki t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu sebesar $2,665 > 1,668$ dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,010 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi asset dan hipotesis pada penelitian ini diterima.

5.1.7 Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel perancu atau residual memiliki distribusi normal dalam model regresi. Dari uji t dan F diketahui nilai residu mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual biasanya terdistribusi atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan pengujian statistik (Ghozali, 2016).

Uji yang digunakan dalam analisis ini adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirno. Model regresi mengikuti asumsi normalitas jika data yang diukur menghasilkan nilai di atas 0,05. Sebaliknya, model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas jika data yang diukur menghasilkan nilai di bawah 0,05.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 19
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		71
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,53407636
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,072
	Negative	-,090
Kolmogorov-Smirnov Z		,761
Asymp. Sig. (2-tailed)		,608

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: *Data primer, diolah 2019*

Berdasarkan tabel diatas, besarnya nilai Kolmogorov smirnov adalah 0,761 dan signifikansi 0,608. Hal ini berarti data residual berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi linier klasik.

5. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah hubungan (netral) antar variabel independen dihitung dengan model regresi. Seharusnya tidak ada hubungan antara variabel independen dalam model regresi yang berhasil. Variabel-variabel ini tidak ortogonal jika variabel independen dikaitkan. Faktor ortogonal merupakan faktor independen dengan signifikansi nol hubungan antara faktor independen (Ghozali, 2016). Dalam analisis ini, dari nilai toleransi dan kebalikan dari faktor inflasi varians (VIF), multikolinieritas dapat ditampilkan. Nilai toleransi <0,10 atau sama dengan nilai VIF> 10 merupakan nilai cutoff yang

biasa digunakan untuk menunjukkan multikolinearitas. Ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Setiap variabel terpisah menjadi variabel dependen secara sederhana dan mundur ke variabel independen lainnya.

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Collinearity	
	Coefficients		Coefficients			Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	4,509	2,040		2,211	,031		
1 inventarisasi	,252	,138	,221	1,822	,073	,392	2,549
1 legal audit	-,076	,163	-,067	-,465	,644	,276	3,621
penilaian	,582	,158	,505	3,693	,000	,308	3,244
pengawasan	,256	,134	,218	1,917	,060	,447	2,235

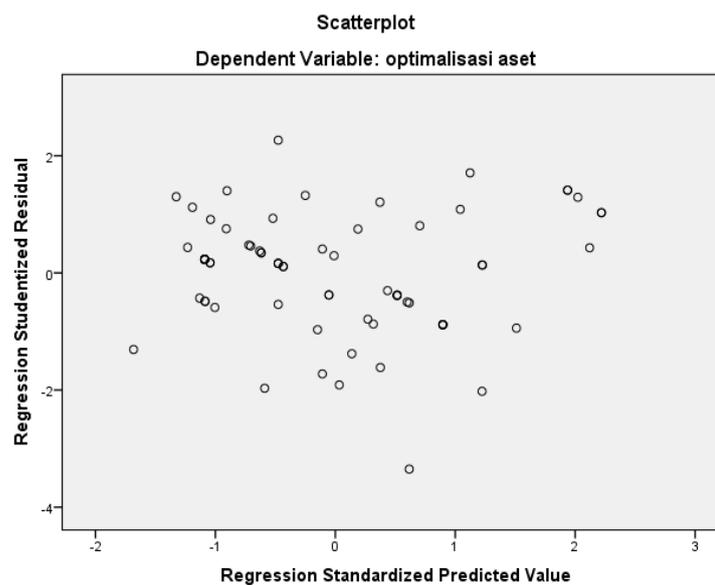
a. Dependent Variable: optimalisasi asset

Sumber: *Data Primer, diolah 2019*

Hasil perhitungan tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Hasil perhitungan ini Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

5. Heteroskedastitas

Melihat grafik plot antara nilai ekspektasi variabel dependen dan residualnya untuk mendeteksi ada tidaknya heteroseastisitas. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola-pola tersebut pada grafik sebar antara keduanya di mana sumbu Y adalah Y yang diproyeksikan dan sumbu X adalah sisa siswa (prediksi Y-Y sebenarnya). Ulasan Dasar (Ghozali, 2013).



Gambar 2

Hasil Uji Heteroskedastitas

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2019*

Berdasarkan gambar di atas yang merupakan hasil uji heteroskedastisitas, dapat dilihat titik-titik pada grafik scatterplot tidak terjadi pengumpulan atau membentuk suatu pola tertentu melainkan hasil yang terjadi adalah terlihat pola titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini.

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, selanjutnya akan di bahas hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Inventarisasi terhadap Optimalisasi Asset pada pemerintah Kota Parepare.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa di lingkup Pemerintah Kota Parepare terdapat pengaruh inventarisasi terhadap optimalisasi aset. Jika pada nilai 2,398 dengan harga signifikansi 0,019 diperoleh dari hasil perhitungan yang dilakukan, artinya nilai t yang diperoleh penting karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel persediaan mempunyai a berdampak signifikan pada pengoptimalan properti. Berdasarkan nilai koefisien regresi yang menunjukkan tanda positif sebesar 0,350, dapat disimpulkan bahwa persediaan berpengaruh positif terhadap optimalisasi aset di lingkup Pemerintah Kota Parepare.

Hasil penelitian ini sejalan dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana pada pemerintah kota parepare telah melakukan inventarisasi yang baik sehingga optimalisasi pengelolaan aset tetap lebih baik pula. Inventarisasi yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang ada, terutama dalam hal pendataan, kodifikasi/labeling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi.

2. Legal Audit berpengaruh terhadap Optimalisasi Asset pada pemerintah Kota Parepare

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial t membuktikan bahwa hasil uji regresi untuk variabel Legal audit memiliki t hitung yang lebih kecil dari pada t tabel yaitu sebesar $-0,245 < 1,668$ dan tingkat signifikansinya lebih besar dari $0,05$ yaitu $0,807 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Legal audit secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi aset dan hipotesis pada penelitian ini di tolak.

Berdasarkan temuan di atas, yang menunjukkan bahwa audit hukum tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset di Kota Parepare, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit hukum belum dilakukan dengan baik, padahal audit hukum telah diatur. dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Properti. Masalah hukum yang sering dihadapi antara lain status kepemilikan yang buruk, properti yang dikendalikan pihak lain, dan transfer aset yang tidak terpantau. Di Pemerintah Kota Parepare, hak penguasaan tanah dilaksanakan dengan mengurus penerbitan sertifikat di banyak bidang tanah milik pemerintah, namun banyak kendala terhadap upaya yang dilakukan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian jusmin dimana legal audit tidak berpengaruh terhadap tingkat optimalisasi aset karena memiliki pengaruh yang negative dan tidak signifikan.

3. Penilaian berpengaruh terhadap optimalisasi Asset Pada Pemerintah Kota Parepare

Uji t parsial membuktikan, berdasarkan hasil uji statistik, bahwa hasil uji regresi untuk variabel pengukuran mempunyai hitung lebih tinggi dari t tabel yaitu $3,331 > 1,668$, dan taraf signifikansi lebih rendah dari 0,05 yaitu $0,001 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, sebagian, variabel evaluasi memiliki pengaruh besar pada pengoptimalan aset dan hipotesisnya diakui dalam tinjauan ini.

Aset yang disewakan kepada pihak ketiga harus terlebih dahulu memiliki nilai yang transparan dan wajar agar nilai yang akan diterima dalam proses leasing tersebut sesuai dengan penggunaan yang ditawarkan oleh aset tersebut. Dalam situasi ini, aset yang disewakan kepada pihak ketiga harus terlebih dahulu memiliki nilai yang wajar dan wajar, sehingga nilai yang akan diperoleh akan sesuai dengan penggunaan yang ditawarkan aset tersebut dalam proses leasing. Salah satu tujuan penilaian adalah menggunakan aset.

Terlihat proses asesmen aset yang dilakukan oleh pemerintah masih belum optimal, karena masih menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak independen (bersertifikat). Sementara penilaian aset itu sendiri merupakan komponen penting dari optimalisasi aset, nilai kekayaan ditentukan oleh penilaian aset. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hayati (2012) yang menyatakan bahwa penilaian aset merupakan suatu proses kerja penilaian aset yang dikendalikan. Umumnya proses kerja ini dilakukan oleh konsultan penilai independen. Efek dari nilai ini dapat digunakan untuk menghitung nilai aset dan rincian untuk menentukan harga aset yang akan dijual.

4. Pengawasan dan Pengendalian berpengaruh terhadap Optimalisasi asset pada Pemerintah Kota Parepare.

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial t membuktikan bahwa hasil uji regresi untuk variabel pengawasan dan pengendalian memiliki t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu sebesar $2,665 > 1,668$ dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,010 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi asset dan hipotesis pada penelitian ini diterima.

Masalah yang sering terjadi di pemerintah daerah adalah pengawasan dan pengendalian. Pemerintah Kota Parepare telah meningkatkan kinerja pengelola barang dengan mengembangkan sistem manajemen aset untuk merespon hal tersebut. Dalam hal semua SKPD berada dalam lingkup pemerintah kota, parepare wajib mencatat semua belanja modal atau belanja barang yang terjadi guna memudahkan pengawasan. Hasil belanja barang atau modal akan dimasukkan ke dalam aplikasi oleh masing-masing SKPD sehingga semuanya dapat tertata dengan jelas dan cepat pada saat pelaporan, dimana pelaporan aset seringkali menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Aronggear (2015) dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa pengawasan dan pengendalian asset tidak terdapat pengaruh secara parsial terhadap pemanfaatan asset tetap sehingga bertolak belakang dengan penelitian ini.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan peneliti tentang pengaruh manajemen aset terhadap tingkat optimalisasi aset pada Pemerintah Kota Parepare yang meliputi Inventarisasi, Legal audit, Penilaian, Pengawasan dan Pengendalian aset, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara persediaan aset terhadap tingkat optimal aset tetap (tanah dan bangunan) milik Pemerintah Kota Parepare, dalam penelitian ini terbukti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan.
2. Dalam analisis ini, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara legal audit terhadap tingkat optimal aset tetap (tanah dan bangunan) milik Pemerintah Kota Parepare tidak terbukti karena terdapat pengaruh yang negatif dan tidak signifikan.
3. Hipotesis ketiga mencatat bahwa penilaian tingkat optimalitas aset tetap (tanah dan bangunan) milik Pemerintah Kota Parepare berpengaruh positif, yang ditunjukkan oleh hasil penelitian yang positif dan penting.
4. Hipotesis keempat menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap tingkat optimal aktiva tetap (tanah dan bangunan) milik Pemerintah Kota

Parepare antara pengawasan dan pengendalian, yang ditunjukkan dalam penelitian ini karena pengaruh yang positif dan substansial.

6.2 Saran

Merujuk daripada hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat peneliti paparkan adalah sebagai berikut :

1. Karena variabel inventaris aset sangat berpengaruh terhadap optimalisasi aset, maka Pemprov Parepare harus lebih meningkatkan kinerja inventaris dalam hal pendataan, pengkodean / pelabelan, pengelompokan dan pembukuan, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dalam hal evaluasi, pengawasan dan penguasaan aset kota. Parepare dan pemantauan aset potensial harus sesuai jadwal.
2. Aktiva audit hukum tidak mempengaruhi tingkat optimalisasi aktiva tetap berdasarkan tanggapan responden, namun perlu dilakukan upaya untuk memperhatikan variabel audit hukum, mengingat audit hukum merupakan salah satu tahapan dalam pengelolaan aktiva yang dilakukan. itu saling berhubungan. Dilihat dari status pengelolaan aset, audit hukum di Pemerintah Daerah Parepare harus ditangani agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghindari pengambilalihan dari pihak lain.
3. Tanggapan dari hasil distribusi responden menunjukkan bahwa penilaian aset berpengaruh terhadap tingkat optimalisasi aset tetap. Oleh karena itu, untuk memastikan nilai sumber daya, Pemkot Parepare harus menganalisis properti melalui konsultan penilaian independen.

4. Pengawasan dan pengendalian aset tetap berpengaruh terhadap tingkat optimalisasi aset di Pemerintah Kota Parepare, dimana pengawasan dan pengendalian aset harus lebih ditingkatkan agar pengelolaan aset tetap terpantau.
5. Pada kesempatan ini peneliti berharap, sebagai ringkasan manajemen, semakin banyak penelitian yang dapat menambahkan variabel independen agar diperoleh hasil yang optimal pada tingkat optimalisasi aset.
6. Sebenarnya peneliti sangat berharap dengan adanya penelitian selanjutnya akan menambah cakupan penelitian sehingga dapat diperoleh jumlah responden yang lebih banyak sehingga hasil penelitian yang berkualitas secara statistik.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan berhubung karena memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian ini.

Beberapa keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian adalah:

1. Jumlah sampel dan keterbatasan waktu serta kemampuan lain mengakibatkan empat variabel bebas terdapat satu variabel yang tidak signifikan dalam hal ini legal audit.
2. Penelitian hanya dilakukan kepada pengurus dan pembantu pengurus barang pada masing-masing SKPD yang semestinya dilakukan pula kepada pengurus asset yang berada pada Bidang Asset pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoh,A.E.(2012).Manajemen Asset Dalam Rangka Optimalisasi Asset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (studi di Kabupaten Paniai). Tesis Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Agustina,M.(2005). Manajemen Aset (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah *Studi Kasus di Kabupaten Pontianak*.
- Bohn. (2002). Pilihan Berbagai Alternatif Manajemen Terhadap Hutang dan Asset Pemerintah dalam Suatu neraca Keuangan.
- Chair.(2001). Peranan Manajemen Dalam Upaya Meningkatkan Kegunaan Asset Tanah dan Bangunan untuk Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Dadang Suwanda. (2013) Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda, Jakarta Pusat,PPM
- Dadson,James,Ebennezer,Kobina. (2006). Optimizing Land asset Management in Ghana a Shared Responsibility and Recipe for Good Governance, Shaping the Change XXIII FIG Congress,Munich, Germany.
- Ghozali. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM
- Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM
- Hanis,H.m.,Trigursyah,B., and Susilawati,C.(2011).. The Application of Public Asset Management in Indonesian Local Government, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.
- Harmono.(2009) Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Jusmin. (2013). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap.http://etd.respository.ugm.ac.id/index.php/mod=penelitian_detail&sub=penelitian_Detail&act=view&typ=html&buku_id=60674
- Mahsun,M. (2003). Analisis Efektifitas Manajemen Aset Properti Riil Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2001/2002) Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik.
- Pakiding. (2006). Pengaruh Manajjemen Aset terhadap Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) studi kasus Bantul.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 (2007) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Phahlevi. (2002). Manajemen Aset Real Estate pada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya. Tesis S2 Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Phelps, Alan James. (2009). An Examination of the Relationship Between Rationale, Practice and Outcomes in Municipal Property Asset Management, International Development Departement School of Government and Society University of Birmingham, A comparative study of the UK and Russia.
- Saban Echdar. (2017). Metode Penelitian Manajemen Bisnis, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Singarimbun. (2013). Metode Penelitian Survei. Jakarta
- Sugiono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Keenambelas. Penerbit CV Alfabeta. Bandung.
- Sugiono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix) Methods). Bandung: Alfabeta.
- Siregar, D. (2004). Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyuni. (2012). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Tesis S2. Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Widayanti, E. (2010). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN 1. SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28, Parepare Telp. (0421) 23594, Fax (0421) 27719, Kode Pos 91111
Email : dpmptsp@pareparekota.go.id; Website : www.dpmptsp.pareparekota.go.id
PAREPARE

Parepare, 4 November 2019
Nomor : 880/IPM/DPM-PTSP/11/2019 Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
Lampiran : --
Perihal : Izin Penelitian

Di -

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Parepare No. 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
6. Surat Direktur Program Pascasarjana STIE Nobel Indonesia Makassar, Nomor : 1158/PPS/STIE-NI/X/2019 Perihal Izin Penelitian Tesis tanggal 30 Oktober 2019

Setelah memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

N a m a : Ramlah
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 31-12-1981
Jenis Kelamin : Wanita
Pekerjaan / Pendidikan : Pegawai Negeri Sipi S2
Program Studi : Magister Manajemen
A l a m a t : JL. Latasakka
RW. 002
RT. 002

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan

Selama : TMT 04/11/2019 S/D 11-11-2019
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera dibelakang Surat Izin Penelitian ini.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Parepare



Hi. ANDI RUSIA, SH., MH

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19620915 198101 2 001

TEMBUSAN : Kepada Yth.

- 1 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
- 2 Walikota Parepare di Parepare

LAMPIRAN 2. KUESIONER PENELITIAN

A. KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP TINGKAT OPTIMALISASI ASET TETAP PEMERINTAH KOTA PAREPARE

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Responden Penelitian

Pengurus Barang Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya penelitian dalam rangka penyusunan Tesis pada Program Pascasarjana Magister Manajemen STIE Nobel Indonesia Makassar yang berjudul “PENGARUH MANAJEMEN ASSET TERHADAP TINGKAT OPTIMALISASI ASSET TETAP PEMERINTAH KOTA PAREPARE”. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu sejenak untuk mengisi angket ini.

Selanjutnya peran aktif Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner terlampir sangat saya harapkan dan berkaitan dengan pengisian kuesioner perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kerahasiaan atas jawaban Bapak/Ibu dijamin oleh peneliti, bahwa hanya untuk keperluan penelitian ini.
2. Apapun jawaban Bapak/Ibu, sama sekali tidak berkaitan dengan penilaian kinerja Bapak/Ibu di tempat bekerja.
3. Jawaban hendaknya sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu terhadap pernyataan yang ada.
4. Masukan Bapak/ Ibu sangat berarti dalam penelitian ini.

Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Hormat, kami

RAMLAH

B. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Pangkat/Gol Ruang :

Jabatan/eselon :

Instansi :

C. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Mohon dengan hormat, bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada, memilih salah satu dari lima alternatif jawaban dengan memberikan tanda checklist pada kolom alternative jawaban yang dianggap paling tepat. Ada lima alternative jawaban :

Sangat Tidak Setuju (STS)	diberi skor	= 1
Tidak Setuju (TS)	dieri skor	= 2
Netral (N)	diberi skor	= 3
Setuju (S)	diberi skor	= 4
Sangat Setuju (ST)	diberi skor	= 5

D. PERNYATAAN PENELITIAN

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
INVENTARISASI (X1)						
1.	Proses inventarisasi/pendataan aset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
2	Kegiatan inventarisasi aset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan labeling menurut jenisnya					
3	Inventarisasi aset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD pemerintah Kota Parepare sudah mengelompokkan menurut jenis barangnya.					
4	Asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan					
5	Proses inventarisasi aset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD pemerintah kota Parepare yang telah dilaksanakan saat ini dapat meningkatkan optimalitas dan pemanfaatan dari asset tersebut.					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
LEGAL AUDIT ((X2)						
1.	Proses Legal audit (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
2	Kegiatan Legal audit asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD pemerintah kota Parepare sudah dilakukan oleh suatu badan/unit kerja yang khusus menangani masalah legal audit asset.					
3	SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah melakukan kegiatan pengurusan sertifikasi kepemilikan asset tanah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kehilangan asset yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi Pemerintah Kota Parepare.					
4	SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah melakukan pengaturan yang jelas mengenai penguasaan, penggunaan dan pengalihan asset tetap (tanah dan bangunan)					
5	Proses Legal audit asset tetap (tanah dan bangunan) SKPD pemerintah kota Parepare yang telah dilaksanakan saat ini dapat mempengaruhi peningkatan optimalitas dari nilai asset tersebut					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
PENILAIAN (X3)						
1.	Proses penilaian aset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
2	SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah melakukan proses penilaian yang dilakukan oleh suatu lembaga penilai yang independen sesuai dengan amanat undang-undang					
3	Kegiatan penilaian terhadap aset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan agar diketahui secara pasti informasi nilai kekayaan yang terkandung didalam asset tersebut.					
4	SKPD pemerintah Kota Parepare sudah melakukan proses penilaian terhadap asset tetap (tanah dan bangunan) dengan mencantumkan nilai asset dalam rupiah					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (X4)						
1.	Proses Pengawasan asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
2	Kegiatan pengawasan dan pengendalian asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD pemerintah Kota Parepare sudah dilakukan oleh suatu badan/unit kerja yang khusus mengenai masalah pengawasan dan pengendalian asset					
3	Kinerja pengawasan dan pengendalian asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD Pemeritnah Kota Parepare sudah ditingkatkan melalui pengembangan sistem informasi manajemen asset (SIMA).					
4	Proses pengawasan dan pengendalian terhadap asset tetap (tanah dan bangunan) pada SKPD pemerintah daerah jika dilaksanakan dengan baik, maka akan dapat mempengaruhi peningkatan optimalitas dari nilai asset tersebut.					

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
OPTIMALISASI ASSET (Y)						
1.	SKPD pemerintah kota Parepare telah merencanakan kebutuhan Asset tetap (tanah dan bangunan) dan pemeliharaan yang telah di tuangkan dalam RKA, kemudian diserahkan pada Bidang Asset.					
2	SKPD Pemerintah Kota Parepare merencanakan kebutuhan asset tetap (tanah dan bangunan) dengan mem perhatikan kondisi barang yang ada dan jumlah pegawai.					
3	Bidang Asset meneliti dan menghimpun daftar kebutuhan asset tetap (tanah dan bangunan) milik daerah untuk satu tahun anggaran.					
4.	Pengadaan dan pemeliharaan asset tetap (tanah dan bangunan) pada Pemerintah Kota Parepare berpedoman pada daftar kebutuhan barang.					
5.	SKPD pemerintah kota Parepare dalam melakukan proses pengelolaan asset tetap (tanah dan bangunan) memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.					
6.	Bidang Asset menerbitkan surat keputusan penetapan penghapusan asset tetap (tanah dan bangunan) berdasarkan usulan SKPD.					
7	Bidang Asset melakukan pengamanan terhadap asset tetap (tanah dan bangunan) baik secara administrative, fisik, maupun hukum agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.					

LAMPIRAN 3. TABULASI DATA RESPONDEN

INVENTARISASI ASSET (X1)

NO	NAMA	1	2	3	4	5	SKOR
1	Hamka	5	5	5	5	4	24
2	Muh. Harry Ginanjar	4	4	4	4	4	20
3	Zulhalman, SE.	4	4	4	4	4	20
4	Asep	4	4	4	4	4	20
5	Budi Hardianto	4	5	4	5	5	23
6	Anry Taufik	4	5	4	5	5	23
7	Kurniati, A.Md.	5	4	5	5	5	24
8	Mulyadi, ST.,MP.	5	4	4	5	5	23
9	Abdul Muin	5	5	3	5	5	23
10	Nasumah	5	4	5	5	4	23
11	Muhammad Idris	4	4	4	5	4	21
12	A. Anwar	5	5	5	5	4	24
13	Muhammad	4	4	4	4	4	20
14	A. Syamsuwandi	5	4	4	4	4	21
15	Disnaker	4	4	4	4	5	21
16	Dinas Kesehatan	4	4	4	4	3	19
17	Sukarno	5	5	5	5	4	24
18	Erik Husein, S.Sos	4	4	4	5	5	22
19	Setdako	5	5	5	5	5	25
20	Setdako	5	5	5	5	5	25
21	Muh. Rahim	3	4	4	4	4	19
22	Hasmia	4	3	4	3	4	18
23	Djamaluddin	4	3	3	4	3	17
24	Sohrah	5	4	4	5	4	22
25	Rusdi Mustafa	4	4	4	5	5	22
26	Abdul Kahar	4	4	5	5	5	23
27	Aco Pahlawan	5	5	4	3	5	22
28	Supiani	4	4	5	5	4	22
29	Syamsul Dg.Jani	4	4	4	4	4	20
30	Hawaluddin	4	4	4	4	4	20
31	A. Agustan Ramli	4	4	4	4	4	20
32	Nurja,ilah, S.Sos.	4	4	4	4	4	20
33	Syahril, Sahel, S.Sos	4	4	3	4	4	19
34	Harifah, SKM	4	4	4	5	4	21
35	Susilawati	5	4	4	4	4	21
36	Maruar Hamid, SP	4	4	4	4	4	20
37	Muh. Nur Fajar	4	4	3	4	4	19

LEGAL AUDIT (X2)

NO	NAMA	1	2	3	4	5	SKOR
1	Hamka	4	4	5	5	5	23
2	Muh. Harry Ginanjar	4	4	4	4	4	20
3	Zulhalman, SE.	4	4	4	4	4	20
4	Asep	4	3	4	4	4	19
5	Budi Hardianto	5	5	5	5	5	25
6	Anry Taufik	5	5	5	5	5	25
7	Kurniati, A.Md.	4	5	5	5	5	24
8	Mulyadi, ST.,MP.	5	5	5	4	5	24
9	Abdul Muin	4	4	5	5	5	23
10	Nasrumah	5	4	4	5	5	23
11	Muhammad Idris	4	4	4	5	4	21
12	A. Anwar	4	4	5	5	4	22
13	Muhammad	5	5	5	4	3	22
14	A. Syamsuwandi	4	5	4	5	5	23
15	Disnaker	4	4	4	4	4	20
16	Dinas Kesehatan	4	4	4	4	4	20
17	Sukarno	4	4	4	5	4	21
18	Erik Husein, S.Sos	4	4	4	4	4	20
19	Setdako	4	5	5	4	5	23
20	Setdako	4	5	5	4	5	23
21	Muh. Rahim	4	4	5	4	4	21
22	Hasmia	4	4	5	4	4	21
23	Djamaluddin	3	4	4	3	3	17
24	Sohrah	5	5	4	4	5	23
25	Rusdi Mustafa	4	4	4	5	5	22
26	Abdul Kahar	4	5	5	5	5	24
27	Aco Pahlawan	5	4	5	4	5	23
28	Supiani	4	5	5	4	4	22
29	Syamsul Dg.Jani	4	4	4	4	4	20
30	Hawaluddin	4	3	4	4	4	19
31	A. Agustan Ramli	4	3	4	4	4	19
32	Nurja,ilah, S.Sos.	4	4	4	3	4	19
33	Syahril, Sahel, S.Sos	4	4	3	3	4	18
34	Harifah, SKM	4	4	4	4	5	21
35	Susilawati	4	4	3	4	4	19
36	Maruar Hamid, SP	4	4	3	4	4	19
37	Muh. Nur Fajar	4	4	4	4	4	20
38	Kec. Bacukiki Barat	5	5	4	4	4	22
39	Muh. Ansa	4	5	3	4	5	21
40	PKM Lapadde	4	5	3	4	5	21
41	Munandan	4	3	4	3	4	18
42	Daud Raank, S.Kep.	4	3	3	4	3	17

NO	NAMA	4	4	3	4	4	19
43	Sarman	4	4	3	4	4	19
44	Menas	4	4	4	4	4	20
45	Hasry Kasmawaty	4	4	4	4	4	20
46	Nurekawati, ST.	4	5	5	4	4	22
47	Sahir Zainuddin	4	4	4	4	4	20
48	Rakhmat	4	4	4	4	4	20
49	Fatmawati	4	4	4	4	5	21
50	Nurdaya, SE.	4	4	4	4	4	20
51	Sudirmanto, S.Pd	4	4	4	4	4	20
52	Fatima Farid, ST	4	4	4	4	4	20
53	Yayuk Sri Multi	4	4	4	4	4	20
54	Kurniawan Suddin	4	4	3	4	4	19
55	Herianto Sudian, S.Sos	4	4	3	4	4	19
56	Zaldi Anwar	5	5	3	3	3	19
57	Pirdaus K, SH	3	3	4	4	4	18
58	Stanislaus	3	2	4	4	4	17
59	A. Mujahidin	5	5	5	5	5	25
60	Supardi S, SE.	5	5	5	5	5	25
61	Muh. Ruslan	4	4	4	4	4	20
62	Hadijah	4	4	4	4	4	20
63	Muhmar Mahmud, S.Kom	4	4	4	4	4	20
64	Nur Tang	5	5	4	5	4	23
65	A. Heru A. Sinta	5	5	4	5	4	23
66	Bacukiki	4	4	4	4	4	20
67	Muh. Yasir	5	4	5	5	4	23
68	A. Abdillah Asis	4	4	4	3	4	19
69	Hasmiah, A.Ma	4	4	5	4	4	21
70	Upriani, SE.	4	4	4	4	4	20
71	Nur Ali	5	5	4	4	4	22
		X2					
		1	2	3	4	5	SKOR
	SS	14	20	20	17	20	91
	S	54	44	40	48	47	233
	N	3	6	11	6	4	30
	TS	0	1	0	0	0	1
	STS	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	71	71	71	71	71	355

PENILAIAN (X3)

NO	NAMA	1	2	3	4	5	SKOR
1	Hamka	4	4	5	5	5	23
2	Muh. Harry Ginanjar	4	4	4	4	4	20
3	Zulhalman, SE.	4	4	4	4	4	20
4	Asep	4	3	4	4	4	19
5	Budi Hardianto	5	5	5	5	5	25
6	Anry Taufik	5	5	5	5	5	25
7	Kurniati, A.Md.	5	5	5	5	5	25
8	Mulyadi, ST.,MP.	5	5	5	4	5	24
9	Abdul Muin	5	5	5	5	5	25
10	Nasrumah	5	5	4	4	5	23
11	Muhammad Idris	4	4	5	4	5	22
12	A. Anwar	4	5	5	5	4	23
13	Muhammad	4	3	3	3	4	17
14	A. Syamsuwandi	5	4	4	4	5	22
15	Disnaker	4	4	4	4	4	20
16	Dinas Kesehatan	4	4	4	4	4	20
17	Sukarno	4	4	4	4	5	21
18	Erik Husein, S.Sos	4	4	3	4	4	19
19	Setdako	5	4	5	4	4	22
20	Setdako	5	4	5	4	4	22
21	Muh. Rahim	4	5	4	5	5	23
22	Hasmia	4	4	4	4	4	20
23	Djamaluddin	4	4	4	4	5	21
24	Sohrah	5	5	4	4	4	22
25	Rusdi Mustafa	4	4	4	5	5	22
26	Abdul Kahar	4	5	5	5	5	24
27	Aco Pahlawan	5	4	4	4	5	22
28	Supiani	5	4	4	4	5	22
29	Syamsul Dg.Jani	4	4	4	4	4	20
30	Hawaluddin	4	5	4	4	4	21
31	A. Agustan Ramli	4	4	4	4	4	20
32	Nurja,ilah, S.Sos.	4	3	4	3	4	18
33	Syahril, Sahel, S.Sos	4	3	3	4	4	18
34	Harifah, SKM	4	5	5	4	5	23
35	Susilawati	4	4	4	4	5	21
36	Maruar Hamid, SP	4	4	4	4	5	21
37	Muh. Nur Fajar	4	3	4	4	4	19
38	Kec. Bacukiki Barat	4	4	4	4	4	20
39	Muh. Ansa	5	5	4	4	4	22
40	PKM Lapadde	5	5	3	3	3	19
41	Munandan	4	4	3	4	4	19
42	Daud Raank, S.Kep.	4	4	3	3	3	17
43	Sarman	4	4	3	4	4	19

NO	NAMA	1	2	3	4	5	SKOR
44	Menas	4	4	3	4	4	19
45	Hasry Kasmawaty	4	4	4	4	4	20
46	Nurekawati, ST.	4	4	4	4	4	20
47	Sahir Zainuddin	5	4	4	4	5	22
48	Rakhmat	4	3	4	4	4	19
49	Fatmawati	4	3	4	4	4	19
50	Nurdaya, SE.	4	3	4	4	4	19
51	Sudirmanto, S.Pd	4	4	4	4	4	20
52	Fatima Farid, ST	4	4	4	4	4	20
53	Yayuk Sri Multi	4	4	4	4	4	20
54	Kurniawan Suddin	4	4	4	4	4	20
55	Herianto Sudian, S.Sos	4	4	4	4	4	20
56	Zaldi Anwar	4	4	4	4	4	20
57	Pirdaus K, SH	4	4	4	4	4	20
58	Stanislaus	4	4	4	4	4	20
59	A. Mujahidin	4	4	4	4	4	20
60	Supardi S, SE.	5	5	5	5	5	25
61	Muh. Ruslan	5	5	5	5	5	25
62	Hadijah	4	3	4	4	4	19
63	Muhmar Mahmud, S.Kom	4	3	4	4	4	19
64	Nur Tang	4	3	4	4	4	19
65	A. Heru A. Sinta	5	4	5	4	4	22
66	Bacukiki	5	4	5	4	4	22
67	Muh. Yasir	4	3	4	4	4	19
68	A. Abdillah Asis	5	4	5	4	4	22
69	Hasmiah, A.Ma	4	4	4	4	4	20
70	Upriani, SE.	4	4	4	4	5	21
71	Nur Ali	4	5	4	4	4	21
		X3					
		1	2	3	4	5	SKOR
	SS	20	17	17	11	23	88
	S	51	42	46	56	46	241
	N	0	12	8	4	2	26
	TS	0	0	0	0	0	0
	STS	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	71	71	71	71	71	355

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (X4)

NO	NAMA	1	2	3	4	SKOR
1	Hamka	4	4	5	5	18
2	Muh. Harry Ginanjar	4	4	4	4	16
3	Zulhalman, SE.	4	4	4	4	16
4	Asep	4	3	4	4	15
5	Budi Hardianto	5	5	5	5	20
6	Anry Taufik	5	5	5	5	20
7	Kurniati, A.Md.	5	5	5	5	20
8	Mulyadi, ST.,MP.	5	5	4	5	19
9	Abdul Muin	5	5	5	5	20
10	Nasrumah	5	5	4	5	19
11	Muhammad Idris	4	5	5	5	19
12	A. Anwar	5	5	4	3	17
13	Muhammad	4	4	3	4	15
14	A. Syamsuwandi	5	4	3	4	16
15	Disnaker	3	3	3	3	12
16	Dinas Kesehatan	3	3	3	3	12
17	Sukarno	4	4	4	5	17
18	Erik Husein, S.Sos	4	4	4	4	16
19	Setdako	4	4	5	4	17
20	Setdako	4	4	5	4	17
21	Muh. Rahim	4	4	4	4	16
22	Hasmia	3	3	4	3	13
23	Djamaluddin	3	4	3	5	15
24	Sohrah	4	5	4	5	18
25	Rusdi Mustafa	4	4	4	4	16
26	Abdul Kahar	4	4	4	5	17
27	Aco Pahlawan	5	4	4	5	18
28	Supiani	4	5	3	5	17
29	Syamsul Dg.Jani	4	4	4	4	16
30	Hawaluddin	4	4	4	4	16
31	A. Agustan Ramli	4	3	3	4	14
32	Nurja,ilah, S.Sos.	4	4	4	4	16
33	Syahril, Sahel, S.Sos	4	4	4	5	17
34	Harifah, SKM	4	4	4	4	16
35	Susilawati	4	4	4	4	16
36	Maruar Hamid, SP	4	4	4	4	16
37	Muh. Nur Fajar	4	3	4	4	15
38	Kec. Bacukiki Barat	5	5	5	5	20
39	Muh. Ansa	4	4	3	4	15
40	PKM Lapadde	4	4	3	4	15
41	Munandan	4	3	3	4	14
42	Daud Raank, S.Kep.	4	4	4	4	16
43	Sarman	4	4	3	4	15

NO	NAMA	1	2	3	4	SKOR
44	Menas	4	4	4	4	16
45	Hasry Kasmawaty	4	4	4	4	16
46	Nurekawati, ST.	4	5	3	5	17
47	Sahir Zainuddin	4	3	3	4	14
48	Rakhmat	4	3	3	4	14
49	Fatmawati	4	3	3	4	14
50	Nurdaya, SE.	4	4	4	4	16
51	Sudirmanto, S.Pd	4	4	4	4	16
52	Fatima Farid, ST	4	4	4	4	16
53	Yayuk Sri Multi	4	4	4	4	16
54	Kurniawan Suddin	4	4	4	4	16
55	Herianto Sudian, S.Sos	4	4	4	4	16
56	Zaldi Anwar	4	4	4	4	16
57	Pirdaus K, SH	4	4	4	4	16
58	Stanislaus	4	4	4	4	16
59	A. Mujahidin	5	5	5	5	20
60	Supardi S, SE.	5	5	5	5	20
61	Muh. Ruslan	4	3	3	4	14
62	Hadijah	4	3	3	4	14
63	Muhmar Mahmud, S.Kom	4	3	3	4	14
64	Nur Tang	4	4	5	4	17
65	A. Heru A. Sinta	4	4	5	4	17
66	Bacukiki	4	3	3	4	14
67	Muh. Yasir	5	5	5	4	19
68	A. Abdillah Asis	5	5	4	5	19
69	Hasmiah, A.Ma	5	4	4	5	18
70	Upriani, SE.	4	4	5	4	17
71	Nur Ali	4	4	5	5	18

	X4					SKOR
	1	2	3	4	5	
SS	15	16	15	21	67	15
S	52	41	36	46	175	52
N	4	14	20	4	42	4
TS	0	0	0	0	0	0
STS	0	0	0	0	0	0
Jumlah	71	71	71	71	284	71

OPTIMALISASI ASSET (Y)

NO	NAMA	1	2	3	4	5	6	7	SKOR
1	Hamka	4	5	5	5	4	4	5	32
2	Muh. Harry Ginanjar	4	4	4	4	4	4	4	28
3	Zulhalman, SE.	4	4	4	4	4	4	4	28
4	Asep	4	4	4	4	5	4	5	30
5	Budi Hardianto	5	5	5	5	5	5	5	35
6	Anry Taufik	5	5	5	5	5	5	5	35
7	Kurniati, A.Md.	5	4	5	5	5	5	5	34
8	Mulyadi, ST.,MP.	4	4	4	4	5	5	5	31
9	Abdul Muin	5	5	5	5	5	5	5	35
10	Nasrumah	5	5	4	4	5	4	5	32
11	Muhammad Idris	5	4	4	4	5	5	5	32
12	A. Anwar	5	5	5	5	4	5	5	34
13	Muhammad	3	4	2	3	4	4	5	25
14	A. Syamsuwandi	4	5	5	3	4	5	5	31
15	Disnaker	4	4	4	4	4	4	4	28
16	Dinas Kesehatan	4	4	4	4	4	4	4	28
17	Sukarno	5	4	4	4	4	4	5	30
18	Erik Husein, S.Sos	4	4	4	4	5	4	4	29
19	Setdako	4	4	4	5	4	4	5	30
20	Setdako	4	4	4	5	4	4	5	30
21	Muh. Rahim	4	4	4	4	4	4	4	28
22	Hasmia	4	4	3	4	4	4	3	26
23	Djamaluddin	4	4	3	3	3	4	4	25
24	Sohrah	4	4	3	3	3	4	4	25
25	Rusdi Mustafa	5	5	4	4	4	5	5	32
26	Abdul Kahar	5	3	3	4	4	5	5	29
27	Aco Pahlawan	5	4	4	3	4	5	5	30
28	Supiani	4	4	5	4	4	4	4	29
29	Syamsul Dg.Jani	4	4	4	4	4	4	4	28
30	Hawaluddin	4	4	4	5	4	4	4	29
31	A. Agustan Ramli	4	4	4	4	4	4	4	28
32	Nurja,ilah, S.Sos.	4	4	4	3	3	4	4	26
33	Syahril, Sahel, S.Sos	4	4	4	4	4	4	4	28
34	Harifah, SKM	4	4	5	4	4	4	4	29
35	Susilawati	3	4	4	3	4	4	4	26
36	Maruar Hamid, SP	3	4	4	3	4	4	4	26
37	Muh. Nur Fajar	4	3	3	4	4	4	4	26
38	Kec. Bacukiki Barat	4	4	4	4	4	5	5	30
39	Muh. Ansa	4	4	4	4	4	4	3	27
40	PKM Lapadde	4	4	4	4	4	4	3	27
41	Munandan	4	4	4	3	3	4	5	27

NO	NAMA	1	2	3	4	5	6	7	SKOR
43	Daud Raank, S.Kep.	4	4	4	4	4	4	4	28
44	Sarman	4	4	3	4	4	4	4	27
45	Menas	4	4	3	4	4	4	4	27
46	Hasry Kasmawaty	4	4	4	4	4	4	4	28
47	Nurekawati, ST.	4	4	4	4	4	4	4	28
48	Sahir Zainuddin	4	4	5	4	4	4	4	29
49	Rakhmat	4	4	3	4	4	4	4	27
50	Fatmawati	4	4	3	4	4	4	4	27
51	Nurdaya, SE.	4	4	3	4	3	4	4	26
52	Sudirmanto, S.Pd	5	5	5	4	4	4	4	31
53	Fatima Farid, ST	4	4	4	4	4	4	4	28
54	Yayuk Sri Multi	4	4	4	4	4	4	4	28
55	Kurniawan Suddin	4	3	4	4	4	4	4	27
56	Herianto Sudian, S.Sos	4	4	4	4	4	4	4	28
57	Zaldi Anwar	4	4	4	4	4	4	4	28
58	Pirdaus K, SH	4	4	4	4	4	5	5	30
59	Stanislaus	4	4	5	5	4	4	4	30
60	A. Mujahidin	4	4	4	4	4	4	4	28
61	Supardi S, SE.	5	5	5	5	5	5	5	35
62	Muh. Ruslan	5	5	5	5	5	5	5	35
63	Hadijah	4	4	3	4	4	4	4	27
64	Muhmar Mahmud, S.Kom	4	4	3	4	4	4	4	27
65	Nur Tang	4	4	3	4	4	4	4	27
66	A. Heru A. Sinta	4	4	4	5	4	4	5	30
67	Bacukiki	4	4	4	5	4	4	5	30
68	Muh. Yasir	4	4	3	4	4	4	4	27
69	A. Abdillah Asis	5	5	5	5	4	4	5	33
70	Hasmiah, A.Ma	3	4	4	4	4	4	5	28
71	Upriani, SE.	3	3	3	5	5	4	5	28
71	Nur Ali	4	4	4	3	4	4	4	27
		Y							
	SS	15	12	15	16	12	15	28	113
	S	51	55	40	45	53	55	40	339
	N	5	4	15	10	5	0	3	42
	TS	0	0	1	0	0	0	0	1
	STS	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	71	71	71	71	70	70	71	495

**DAFTAR PENGURUS DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	SKPD	URAIAN	JUMLAH
1	SEKRETARIAT DAERAH KOTA	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
2	SET DPRD	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
4	DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
5	DINAS KESEHATAN	PENGURUS BARANG	3
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
6	DINAS PENDIDIKAN	PENGURUS BARANG	2
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
7	DINAS PEKERJAAN UMUM	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
9	DINAS PERHUBUNGAN	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
11	DINAS TENAGA KERJA	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1

12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
13	DINAS SOSIAL	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
14	DINAS PERUMAHAN KAWASANPEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
15	DINAS PERDAGANGAN	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
16	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
17	BADAN KEUANGAN DAERAH	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
18	INSPEKTORAT	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
19	RSUD A. MAKKASAU	PENGURUS BARANG	3
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1
23	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU PENGURUS BARANG	1

24	DINAS PEMBERDAYAAN	PENGURUS BARANG	1
	PEREMPUAN DAN	PEMBANTU	1
	PERLINDUNGAN ANAK	PENGURUS BARANG	
25	DINAS PENANAMAN MODAL	PENGURUS BARANG	1
	DAN PELAYANAN TERPADU	PEMBANTU	1
		PENGURUS BARANG	
26	DINAS PERPUSTAKAAN	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU	1
		PENGURUS BARANG	
27	DINAS KETAHANAN PANGAN	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU	1
		PENGURUS BARANG	
28	STUAN POLISI PAMONG PRAJA	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU	1
		PENGURUS BARANG	
29	KECAMATAN UJUNG	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU	1
		PENGURUS BARANG	
30	KECAMATAN SOREANG	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU	1
		PENGURUS BARANG	
31	KECAMATAN BACUKIKI	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU	1
		PENGURUS BARANG	
32	KECAMATAN BACUKIKI BARAT	PENGURUS BARANG	1
		PEMBANTU	1
		PENGURUS BARANG	
33	BADAN PENANGGULANGAN	PENGURUS BARANG	1
	BENCANA DAERAH	PEMBANTU	1
		PENGURUS BARANG	
	JUMLAH		71

LAMPIRAN 4. PENGOLAHAN DATA PENELITIAN

1. Hasil Tanggapan Responden

Frequencies

		Notes
Output Created		29-JAN-2020 08:11:08
Comments		
Input	Data	E:\hhhj\terakhir1.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	71
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=x1_1 x1_2 x1_3 x1_4 x1_5 x2_1 x2_2 x2_3 x2_4 x2_5 x3_1 x3_2 x3_3 x3_4 x3_5 x4_1 x4_2 x4_3 x4_4 y_1 y_2 y_3 y_4 y_5 y_6 y_7 /HISTOGRAM NORMAL /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:12,00
	Elapsed Time	00:00:13,11

Frequency Table

INVENTARISASI ASSET (X1)

x1_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	netral	1	1,4	1,4	1,4
	setuju	46	64,8	64,8	66,2
	sangat setuju	24	33,8	33,8	100,0
	Total	71	100,0	100,0	

x1_2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
tidak setuju	1	1,4	1,4	1,4
netral	5	7,0	7,0	8,5
Valid setuju	48	67,6	67,6	76,1
sangat setuju	17	23,9	23,9	100,0
Total	71	100,0	100,0	

x1_3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
netral	7	9,9	9,9	9,9
Valid setuju	44	62,0	62,0	71,8
sangat setuju	20	28,2	28,2	100,0
Total	71	100,0	100,0	

x1_4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
netral	2	2,8	2,8	2,8
Valid setuju	44	62,0	62,0	64,8
sangat setuju	25	35,2	35,2	100,0
Total	71	100,0	100,0	

x1_5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
netral	2	2,8	2,8	2,8
Valid setuju	47	66,2	66,2	69,0
sangat setuju	22	31,0	31,0	100,0
Total	71	100,0	100,0	

LEGAL AUDIT (X2)

X2_1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
netral	3	4,2	4,2	4,2
setuju	54	76,1	76,1	80,3
sangat setuju	14	19,7	19,7	100,0
Total	71	100,0	100,0	

x2_2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
tidak setuju	1	1,4	1,4	1,4
netral	6	8,5	8,5	9,9
setuju	44	62,0	62,0	71,8
sangat setuju	20	28,2	28,2	100,0
Total	71	100,0	100,0	

x2_3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
netral	11	15,5	15,5	15,5
setuju	40	56,3	56,3	71,8
sangat setuju	20	28,2	28,2	100,0
Total	71	100,0	100,0	

x2_4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid netral	6	8,5	8,5	8,5
Valid setuju	48	67,6	67,6	76,1
Valid sangat setuju	17	23,9	23,9	100,0
Total	71	100,0	100,0	

x2_5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid netral	4	5,6	5,6	5,6
Valid setuju	47	66,2	66,2	71,8
Valid sangat setuju	20	28,2	28,2	100,0
Total	71	100,0	100,0	

PENILAIAN (X3)**x3_1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid setuju	51	71,8	71,8	71,8
Valid sangat setuju	20	28,2	28,2	100,0
Total	71	100,0	100,0	

x3_2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid netral	12	16,9	16,9	16,9
Valid setuju	42	59,2	59,2	76,1
Valid sangat setuju	17	23,9	23,9	100,0
Total	71	100,0	100,0	

x3_3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid netral	8	11,3	11,3	11,3
Valid setuju	46	64,8	64,8	76,1
Valid sangat setuju	17	23,9	23,9	100,0
Total	71	100,0	100,0	

x3_4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid netral	4	5,6	5,6	5,6
Valid setuju	56	78,9	78,9	84,5
Valid sangat setuju	11	15,5	15,5	100,0
Total	71	100,0	100,0	

x3_5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid netral	2	2,8	2,8	2,8
Valid setuju	46	64,8	64,8	67,6
Valid sangat setuju	23	32,4	32,4	100,0
Total	71	100,0	100,0	

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (X4)**x4_1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid netral	4	5,6	5,6	5,6
Valid setuju	52	73,2	73,2	78,9
Valid sangat setuju	15	21,1	21,1	100,0
Total	71	100,0	100,0	

x4_2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
netral	14	19,7	19,7	19,7
setuju	41	57,7	57,7	77,5
sangat setuju	16	22,5	22,5	100,0
Total	71	100,0	100,0	

x4_3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
netral	20	28,2	28,2	28,2
setuju	36	50,7	50,7	78,9
sangat setuju	15	21,1	21,1	100,0
Total	71	100,0	100,0	

x4_4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
netral	4	5,6	5,6	5,6
setuju	46	64,8	64,8	70,4
sangat setuju	21	29,6	29,6	100,0
Total	71	100,0	100,0	

OPTIMALISASI ASSET (Y)**y_1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
netral	5	7,0	7,0	7,0
setuju	51	71,8	71,8	78,9
sangat setuju	15	21,1	21,1	100,0
Total	71	100,0	100,0	

y_2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
netral	4	5,6	5,6	5,6
setuju	55	77,5	77,5	83,1
sangat setuju	12	16,9	16,9	100,0
Total	71	100,0	100,0	

y_3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
tidak setuju	1	1,4	1,4	1,4
netral	15	21,1	21,1	22,5
setuju	40	56,3	56,3	78,9
sangat setuju	15	21,1	21,1	100,0
Total	71	100,0	100,0	

y_4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
netral	10	14,1	14,1	14,1
setuju	45	63,4	63,4	77,5
sangat setuju	16	22,5	22,5	100,0
Total	71	100,0	100,0	

y_5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
netral	5	7,0	7,0	7,0
setuju	54	76,1	76,1	83,1
sangat setuju	12	16,9	16,9	100,0
Total	71	100,0	100,0	

y_6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid setuju	56	78,9	78,9	78,9
Valid sangat setuju	15	21,1	21,1	100,0
Total	71	100,0	100,0	

y_7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid netral	3	4,2	4,2	4,2
Valid setuju	40	56,3	56,3	60,6
Valid sangat setuju	28	39,4	39,4	100,0
Total	71	100,0	100,0	

2. Hasil Uji Regresi

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	pengawasan, legal audit, inventarisasi, penilaian ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: optimalisasi aset

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,824 ^a	,679	,659	1,52216

a. Predictors: (Constant), pengawasan, legal audit, inventarisasi, penilaian

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	323,024	4	80,756	34,854	,000 ^b
	Residual	152,919	66	2,317		
	Total	475,944	70			

a. Dependent Variable: optimalisasi aset

b. Predictors: (Constant), pengawasan, legal audit, inventarisasi, penilaian

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,706	2,152		2,187	,032
	inventarisasi	,350	,146	,267	2,398	,019
	legal audit	-,042	,172	-,032	-,245	,807
	penilaian	,554	,166	,419	3,331	,001
	pengawasan	,376	,141	,278	2,665	,010

a. Dependent Variable: optimalisasi aset